

**ANALISIS MANUEVER PARTAI SOLIDARITAS
INDONESIA (PSI) DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW)
SUMATERA SELATAN DALAM PUTARAN PEMILU 2019**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Politik**

Oleh :

SUBHAN ROBIHAN

1617020122

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG 1442 H / 2021 M**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth
Bapak Dekan Fak. Ilmu sosial Dan
Ilmu Politik UIN Raden Fatah
Di-

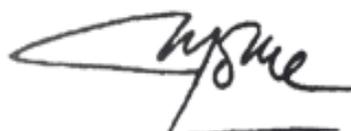
Palembang

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara Subhan Robihan dengan NIM. 1617020122 yang berjudul "Analisis Manuver Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sumatera Selatan Dalam Putaran Pemilu 2019" sudah dapat diajukan dalam sidang munaqosah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang. Demikian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb

Pembimbing I

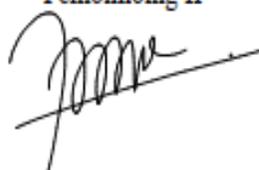


Prof. Dr. H. Izomiddin, MA.

NIP. 196206201988031001

Palembang, 16 Juli 2021

Pembimbing II



Yulion Zalpa, MA.

NIP. 198807072019031011

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Subhan Robihan
Nim : 1617020122
Jurusan : Ilmu Politik
Judul : Analisis Manuver Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sumatera Selatan
Dalam Putaran Pemilu 2019

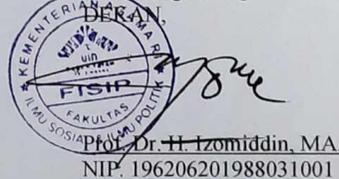
Telah dimunaqosahkan dalam sidang terbuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

Hari / Tanggal : Rabu, 04 Agustus 2021

Tempat : Secara Daring Menggunakan Zoom

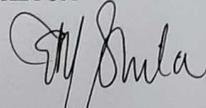
Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Politik.

Palembang, 25 Agustus 2021


Prof. Dr. H. Izomiddin, M.A.
NIP. 196206201988031001

TIM PENGUJI

KETUA



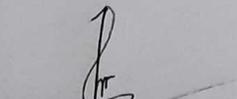
Dr. Eti Yusnita, S.Ag M.Hi
NIP. 197409242007012016

SEKRETARIS



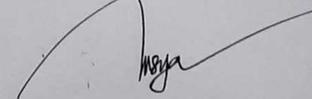
Ryllian Chandra, M.A
NIP. 1986040520190301011

PENGUJI 1



Dr. Kun Budianto, M.Si
NIP. 197612072007011010

PENGUJI 2



Siti Anisya, M.Si
NIDN. 2012129301

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Subhan Robihan

Nim : 1617020122

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Analisis Manuver Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sumatera Selatan Dalam Putaran Pemilu 2019

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data dan informasi, interpretasi, pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Skripsi yang tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang maupun di perguruan Tinggi lainnya.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak benaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh pengajuan skripsi ini.

Palembang, Juli 2021


Subhan Robihan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**“Tanpa Pengorbanan Tidak Ada Kemenangan. Yakinkan Dengan Iman,
Usahakan Dengan Ilmu, Sampaikan Dengan Amal”**

“Man Jadda Wa Jadda”

(Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkannya)

Kupersembahkan untuk:

- **Allah SWT**
- **Orang Tua**
- **Saudara-saudaraku**
- **Sahabat Terbaikku**
- **Teman-temanku**
- **UIN RF Palembang**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang manuver politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam menentukan langkah-langkah strategis yang dilakukan PSI DPW Sumsel dan cara PSI DPW Sumsel merekrut anak muda dan menjadikannya sebagai basis kekuatan politik partai. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada hakikatnya ialah melakukan pengamatan terhadap individu -individu dengan cara berdialog langsung untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang hal-hal yang diteliti. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPW Sumsel melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan kepemudaan dan merekrut anak muda sebagai basis kekuatan politik partai dimana hal ini dilakukan secara langsung dengan tujuan agar dikenal masyarakat lebih dalam. Sebagai partai yang baru sekali ikut dalam kontestasi pemilu pada tahun 2019, PSI DPW Sumsel harus lebih teliti dalam memilih seseorang yang dijadikan tokoh, karena ketokohanlah yang dinilai penting oleh masyarakat dengan komitmen yang kuat demi mencapai tujuan yang sama-sama masyarakat inginkan.

Kata Kunci : Manuver politik, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Pemilu 2019

ABSTRACT

This study discusses the political maneuvers of the Indonesian Solidarity Party (PSI) for the Regional Representative Council (DPW) of South Sumatra (South Sumatra) in determining the strategic steps taken by the South Sumatra PSI DPW and how the South Sumatra PSI DPW recruits young people and makes them the basis of the party's political power. This study uses a qualitative research approach. Qualitative research is essentially an observation of individuals by means of direct dialogue to obtain a comprehensive picture of the things being studied. The Indonesian Solidarity Party (PSI) DPW South Sumatra conducts political socialization to the community by conducting social activities, youth activities and recruiting young people as the party's political power base where this is done directly with the aim of being known to the public more deeply. As a party that has only participated in the 2019 general election contestation, PSI DPW South Sumatra must be more careful in choosing someone to become a figure, because it is character who is considered important by the community with a strong commitment to achieve the goals that the community wants.

Keywords : Political Maneuvers, Indonesian Solidarity Party (PSI), Election 2019

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah Robbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta ridho-Nya, sehingga dalam penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat kemudahan disetiap kesulitan. Sholawat beserta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai syarat untuk menyelesaikan masa perkuliahan pada program strata satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik dengan judul “**Analisis Manuver Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sumatera Selatan Dalam Putaran Pemilu 2019**”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.A** selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang, beserta staf rektorat yang telah memberikan ranah

untuk menempuh kegiatan-kegiatan yang menopang selama perkuliahan baik itu dibidang akademik maupun non akademik.

2. **Prof. Dr. H. Izomiddin, MA** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, beserta Wakil Dekan yang telah memfasilitasi mahasiswa-mahasiswanya terkhusus mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Politik.
3. **Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.Hi** sebagai ketua Prodi dan **Rylian Chandra Eka Viana, M.A** sebagai sekretaris prodi Ilmu Politik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada saya selama menjalani masa perkuliahan di UIN Raden Fatah Palembang.
4. **Badarudin Azarkasyi, SE. MM** selaku penasehat akademik, yang selalu memberikan arahan nasihat dari awal perkuliahan sampai dengan skripsi ini.
5. **Prof. Dr. H. Izomiddin, MA** selaku dosen pembimbing skripsi 1 yang telah membimbing serta memberikan saran dan dukungan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. **Yulion Zalpa, MA** selaku dosen pembimbing skripsi 2 yang telah banyak membantu memberikan masukan, semangat, dan bimbingan selama menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh Bapak Dosen dan Ibu Dosen yang telah membekali saya dengan berbagai ilmu selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
8. Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang atas segala bantuan selama saya menempuh perkuliahan.
9. Kedua Orang tua saya Ayahanda **Nuzuluddin** dan Ibunda **Ichwati** yang telah melahirkan dan membesarkan saya serta mendidik saya hingga bisa seperti sekarang ini. Serta selalu menyemangati dan doa yang tidak pernah putus yang selalu diberikan pada saya dan kasih sayang yang tulus. Bahkan kata mutiara pun belum mampu menggambarkan rasa terimakasih penulis atas segala dukungannya dalam menggapai cita-cita yang mulia ini. Tak lupa untuk adik-adik saya **Ihsan Al Fathir** dan **M. Khairul Fata**, terimakasih *support* nya selama ini yang selalu membantu kapanpun penulis butuhkan. *I owe you!*
10. Sahabat terbaikku **Aini Luthfiyyah, S.Sos.** Terimakasih telah menjadi sahabat terbaikku dan tempat berkeluh kesahku selama ini. Terima Kasih telah mendengarkanku. Terima kasih banyak juga untuk semua dukungan, semangat dan doa yang selalu kau berikan. Jangan pernah bosan untuk menjadi pendengar terbaikku.

11. Sahabat, teman seperjuangan kelas Ilmu Politik 4 2016 dan kawan-kawan kantin Rfc 20. Teman-teman seperjuangan Organisasi HMI Dakwah dan Fisip UIN Raden Fatah Palembang semoga kita sama-sama sukses dalam cita-cita kita.
12. DPW Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Selatan.
13. Untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam penelitian skripsi ini, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Tanpa mengurangi rasa hormat, penulis ucapkan terimakasih banyak.
14. *Last but not least, terimakasih my blood, sweat and tears!*

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik dan saran sebagai masukan bagi penulis untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan. Aamiin Ya Robbal'Alaamiin.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Palembang, 7 Juli 2021
Penulis

Subhan Robihan
NIM. 1617020122

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	<i>vii</i>
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori	12
1. Manuver Politik	12
2. Pelembagaan Partai Politik.....	14
G. Metodologi Penelitian.....	18
1. Metode Penelitian	18
2. Data dan Sumber Data.....	19
3. Objek Penelitian	19
4. Teknik Pengumpulan Data	19
5. Teknik Analisis Data	20
6. Sistematika Penulisan.....	22

BAB II KAJIAN PUSTAKA YANG RELEVAN

A. Partai Politik	25
B. Fungsi Partai Politik	28
C. Manuver Politik	34
D. Pemilihan Umum	35

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Provinsi Sumatera Selatan	40
B. Sejarah Partai Solidaritas Indonesia	42
C. Visi dan Misi Partai Solidaritas Indonesia	44
D. Nilai Dasar Karakter Partai Solidaritas Indonesia	45
E. Logo Partai Solidaritas Indonesia	46
F. Syarat Menjadi Kader dan Pengurus PSI	48
G. DPW Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Sumsel	51
H. Perolehan Suara PSI DPW Sumsel pada pemilu 2019	56
I. Struktur Kepengurusan DPW PSI Sumsel	58

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Manuver Politik PSI Pada Pemilu 2019	60
1. Aspek Kultural	60
2. Aspek Struktural	67
B. Basis Kekuatan Politik Anak Muda Dalam PSI	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA	82
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	84
-----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan	41
Tabel 3.2 Daftar DPD Partai Solidaritas Indonesia	52
Tabel 3.3 Elektabilitas Partai Baru Peserta Pemilu 2019	54
Tabel 3.4 Perolehan Suara PSI DPW Sumsel Setiap Kabupaten/Kota	56
Tabel 4.1 Nomor Urut, Nama Partai Politik dan Nama Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu 2019	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo Partai Solidaritas Indonesia.....	47
Gambar 3.2 Hasil Perolehan Suara Pemilu DPRD Prov. Sumsel 2019	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu di perhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di suatu pihak dan pemerintah di pihak lain (Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, hal. 397-398. 2018).

Di Indonesia, perkembangan partai politik dapat di golongkan dalam beberapa periode perkembangan, dan setiap kurun waktu mempunyai ciri dan tujuan masing-masing, yaitu pada masa penjajahan Belanda, masa pendudukan Jepang dan masa merdeka. Kehadiran partai politik di masa penjajahan Belanda merupakan manifestasi kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, semua kegiatan partai politik dilarang, hanya golongan Islam yang diberi kebebasan untuk membentuk partai Masyumi yang lebih banyak bergerak di bidang sosial. Setelah beberapa bulan proklamasi kemerdekaan, terbuka kesempatan yang besar untuk mendirikan partai politik, sehingga

bermunculan partai-partai politik di Indonesia. Dengan demikian kita kembali kepada pola sistem multi partai.

Adapun salah satu Partai Politik di Indonesia yang baru saja berdiri pada tanggal 16 November 2014. Partai tersebut merupakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang di pimpin oleh Grace Natalie, yang mana Grace Natalie adalah seorang mantan pembawa acara berita dan jurnalis. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi menjadi peserta Pemilu tahun 2019 setelah memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum dan merupakan satu-satunya partai baru yang lolos seleksi badan hukum pasca Pemilihan Presiden tahun 2014. (PSI.or.id 6 november 2020)

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai salah satu partai politik yang baru di Pemilu 2019 menawarkan pembaruan dalam politik Indonesia dengan kepengurusan yang umurnya di bawah 45 tahun dan belum pernah menjadi anggota partai politik mana pun sebelumnya. Artinya, PSI menginginkan anak-anak muda yang benar-benar baru di dalam dunia politik.

Partai Solidaritas Indonesia lebih dulu dinyatakan lolos verifikasi faktual tingkat nasional maupun tingkat provinsi dan kabupaten/kota oleh KPU. Dengan banyaknya jumlah anggota yang

bergabung pada Partai Solidaritas Indonesia ini merupakan salah satu faktor pendukung dalam keberhasilan memenuhi syarat jumlah anggota sesuai dengan tingkat kepengurusan dalam verifikasi faktual yang tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.

Sebagai pendaatang baru dalam konstetasi politik, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) perlu segera mengambil langkah-langkah strategis untuk meraih simpati masyarakat, sehingga masyarakat akan menjadi pemilih Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pilkada 2019 mengukuhkan Ada 195,6 juta orang yang memiliki hak pilih. Dari sisi data kependudukan, hampir 40% di antaranya adalah pemilih pemula. Hal ini tentunya menjadi nilai tambah PSI yang menentukan kelompok pemilihnya yaitu pemilih muda.

Partai politik harus punya identitas dalam menghadapi pemilu. Kita tahu pemilih di Indonesia kini semakin cerdas dan semakin rasional. Identitas merupakan hal yang sangat penting dalam memperkenalkan sebuah partai politik ke masyarakat. Visi-misi, ideologi, dan program partai pro-rakyat menjadi sebuah keharusan di era reformasi ini demi memenangkan hati masyarakat. Partai Solidaritas Indonesia yang didirikan pada 16 November 2014 lalu

menawarkan trilogi perjuangan PSI yaitu Menebar Kebajikan, Merawat Keragaman, dan Mengukuhkan Solidaritas. Hal ini yang menjadi identitas PSI dalam menjaga keragaman.

Di Provinsi Sumatera Selatan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) banyak melakukan berbagai hal. PSI lebih aktif dan peduli terhadap politik maupun sosial di Sumatera Selatan. PSI Sumatera Selatan juga sudah punya program tetap, yakni cafe solidaritas. PSI ini sedikit unik, karena tidak membuat acara formal atau hiburan, melainkan lebih kepada edukasi.

Dalam hal elektabilitas, PSI cenderung stabil untuk ukuran partai baru, elektabilitas PSI tercatat menguat 1% pada bulan Desember dibandingkan dua bulan sebelumnya. Menurut survey Y-Publica yang dirilis pada Jumat, 14 Desember 2018 Elektabilitas PSI lebih tinggi dibandingkan dengan partai-partai baru yang menjadi peserta pemilu 2019 dengan perolehan sebesar 2,6%, disusul dengan partai Perindo sebesar 2,5%, setelah itu partai Berkarya sebesar 0,8% dan Partai Garuda sebesar 0,5%. (survey Y-Publica)

Pada pemilihan legislatif 2019, PSI DPW Sumsel belum bisa duduk dalam legislatif karena Partai Solidaritas Indonesia nihil dalam kursi pemilihan umum 2019. Namun berdasarkan hasil survei Y-

Publica elektabilitas tertinggi di dapil Sumatera Selatan 1 masih dipegang calon legislatif petahana asal Golkar, Kahar Muzakir dengan 9,4%. Disusul petahana lainnya, Edhy Prabowo dari Gerindra (7,6%). Muka-muka lama masih mendominasi perebutan kursi DPR RI di Dapil Sumatera Selatan I. Meski begitu, calon legislatif dari partai pendatang baru seperti PSI ternyata tetap berpeluang lolos. Calon legislatif pendatang baru dari PSI berpeluang mematahkan dominasi dinasti politik di dapil Sumsel 1, Mantan jurnalis televisi Rizki Hidayatullah menyumbangkan satu kursi untuk PSI dengan elektabilitas 3,6% (Survei: PSI Tembus Dominasi Dinasti Politik di Sumsel I, 2019).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan PSI DPW Sumsel dalam bentuk skripsi dengan judul ” **Analisis Manuver Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sumatera Selatan Dalam Putaran Pemilu 2019**”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan penjelasan diatas, maka dapat ditarik pokok permasalahan sebagai langkah memfokuskan penelitian ini. Rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimana manuver politik PSI DPW SUMSEL pada pemilu 2019?
2. Bagaimana cara PSI DPW SUMSEL merekrut anak muda dan menjadikannya sebagai basis kekuatan politik partai?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui manuver politik PSI DPW SUMSEL pada pemilu 2019.
2. Untuk mengetahui cara PSI DPW SUMSEL dalam merekrut anak muda dan menjadikannya sebagai basis kekuatan politik partai.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperkaya dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik yang melihat perkembangan rekrutmen dan menjadikannya sebagai kekuatan politik yang dilakukan partai politik baru.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi masyarakat, terutama dalam keikutsertaan masyarakat sebagai anggota kader partai.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penting kiranya bagi peneliti untuk meninjau penelitian-penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Peninjauan ini dilakukan untuk memberikan keragaman perspektif yang dapat menjadi perbandingan dalam melakukan penelitian.

Pertama, penelitian yang di tulis Iding Rosyidin (Pikiran Rakyat, Senin 8 Desember 2014) tentang ”*Manuver Politik Golkar*” dalam penelitian ini penulis mengatakan bahwa ada sejumlah hal yang dapat dimanfaatkan Golkar untuk menyokong manuvernya itu. Pertama, kepaiawaian dan kelincahan politisi-politisi partai beringin di parlemen. Fakta yang sulit dibantah adalah bahwa mereka merupakan para politisi paling berpengalaman dalam kancah politik Indonesia sehingga mengetahui betul cita rasa para politisi di negeri ini. Kemenangan KMP terutama dalam pemilihan pimpinan MPR yang melibatkan DPD menjadi bukti kuat padahal di atas kertas suara mereka kalah dari KIH. Kedua, anggota-anggota DPR sendiri baik yang ada di KMP maupun KIH, sebenarnya secara personal diam-diam banyak

yang lebih suka pilkada tidak langsung karena lebih praktis, tidak melelahkan dan sebagainya. Realitas ini tentu akan dimanfaatkan betul oleh Golkar yang memang sangat piawai dalam melakukan persuasi politik kepada para anggota legislatif tersebut seperti keberhasilannya dalam membujuk anggota DPD dalam memilih pimpinan MPR (Rosyidin, 2014).

Kedua, penelitian yang di tulis oleh Rudi Saputra (2018) tentang “Rekrutmen Partai Politik (Studi Pola Rekrutmen Partai Solidaritas Indonesia Terhadap Anak Muda)”. Skripsi Program Studi Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa PSI dalam hal rekrutmen politik hanya memiliki kriteria khusus terhadap pengurus partai, sedangkan untuk anggota PSI tidak memiliki kriteria khusus di dalamnya. Kriteria khusus PSI dalam memilih pengurus ialah melihat dari batasan umur. Pengurus PSI harus berusia dibawah 45 tahun karena itu sudah merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI. Selain kriteria khusus yang diberikan kepada pengurus, sistem dan mekanisme rekrutmen yang digunakan oleh PSI juga berbeda antara pengurus dan anggota. Sistem rekrutmen terhadap pengurus didasarkan atas kekerabatan (patronase). Sistem kekerabatan yang digunakan oleh PSI untuk penentuan orang-orang yang akan

menempati jabatan-jabatan di internal partai. Terdapat dua alasan kenapa rekrutmen pengurus dilakukan berdasarkan sistem kekerabatan. Pertama, pengurus PSI Jakarta memiliki loyalitas tinggi dan merupakan pendukung yang kuat terhadap partai dan Ahok. Kedua, pengurus yang direkrut memang berfokus untuk bekerja bukan untuk suatu kegiatan politik. Sedangkan sistem rekrutmen yang digunakan oleh PSI terhadap anggota partai yaitu dengan sistem terbuka. Penerimaan anggota ini tidak melihat status, kedudukan, dan kekayaan seseorang. PSI menggunakan tiga cara dalam melakukan rekrutmen terhadap anggota. Pertama, pendaftaran secara online, kedua pengurus PSI Jakarta mendatangi langsung ke rumah-rumah masyarakat melalui DPD wilayah masing-masing dan yang terakhir masyarakat bisa secara langsung datang ke kantor DPW PSI DKI Jakarta untuk melakukan pendaftaran dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pengurus (Saputra, 2018).

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Warsito dan Yeni Prasetyo tentang “Pola Rekrutmen Calon Legislatif Partai Politik” dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa proses rekrutmen calon anggota legislatif pada pemilu 1999 dan pemilu 2004 dalam tubuh DPD II partai Golkar Kota Semarang secara substantif sama, hanya berbeda pada masalah sistem penilaian dan kewenangan tim seleksi.

Yaitu sama-sama direkrut dari kader yang berasal dari ormas pendiri partai, organisasi sayap partai, dan unsur seluruh DPD kelurahan sampai kecamatan. Perbedaan pola rekrutmen pemilihan caleg hanya terletak pada berlakunya fungsi koordinasi antara DPD kecamatan dengan ormas pendiri dan organisasi sayap partai yang pada akhirnya menimbulkan persyaratan administrasi yang mengharuskan bagi kadernya yang akan masuk dalam seleksi caleg minimalnya harus pernah menjadi pengurus di lembaga struktural partai (DPD kelurahan/desa, kecamatan, Kota/Kabupaten) dan lembaga fungsional partai (ormas pendiri partai dan organisasi sayap partai) (warsito).

Keempat, jurnal karya Fernanda Putra Adela tentang “Proses Rekrutmen Politik Calon Legislatif Lokal di Medan Pada Pemilu 2009” (Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera). Dalam penelitian ini penulis mengatakan bahwa pelaksanaan proses rekrutmen calon legislatif Kota Medan yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera belum sepenuhnya menyentuh aspek keterbukaan yang dilihat dari pemberian informasi tentang rekrutmen calon legislatif kepada masyarakat. Antara masyarakat dan Partai Keadilan Sejahtera tidak terbentuk sebuah hubungan dalam tahapan rekrutmen tersebut. Pengembangan basis pada komunitas sipil terfokus pada kelompok-kelompok pengajian. PKS secara struktural tidak memiliki organisasi-organisasi underbow

guna pemetaan dan pengembangan basis dengan komunitas sipil. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berpandangan bahwa kemampuan PKS di kota Medan meraih dukungan suara cukup besar dari masyarakat kota Medan sesungguhnya tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh proses rekrutmen calon legislatif yang dilakukan PKS. Karena, merujuk dari model demokratis yang ditawarkan oleh Sutoro Eko terdapat banyak hal yang tidak terlaksana oleh PKS dalam proses rekrutmennya. Partai Keadilan Sejahtera sangat eksklusif melakukan proses rekrutmen tersebut. Masyarakat umum tidak memiliki posisi tawar untuk masuk menjadi calon anggota legislatif PKS. Sehingga penulis melihat bahwasanya kaderisasi yang berjalan baik di PKS yang membuat seluruh kader-kader PKS terideologisasikan atas visi perjuangan partai membuat PKS konsisten mencitrakan diri sebagai partai yang bersih dan peduli terhadap masyarakat. Hal inilah yang menjadi daya tarik masyarakat untuk menjadi pemilih PKS pada pemilihan umum legislatif. Kader-kader PKS dianggap memiliki integritas dan moralitas yang tinggi, sehingga mampu untuk menjaga amanah sebagai wakil rakyat (adela, 2009).

Kelima, Jurnal Pemilu Dan Demokrasi #11 tentang “Demokratisasi Rekrutmen Partai Politik” (Derajat Transparansi Partai Politik dalam Seleksi Bacaleg Pemilu 2019) penulis Yuyun Dwi

Puspitasari menyimpulkan bahwa enam belas partai politik peserta Pemilu 2019 memiliki website dalam memperluas akses informasi bagi masyarakat. Website PAN dalam kondisi tidak dapat diakses. Aturan UU maupun PKPU tentang kewajiban partai politik melaksanakan seleksi bacaleg secara demokratis dan terbuka tidak didukung dengan rincian aturan yang lebih jelas. Peraturan yang ada menyerahkan mekanisme seleksi demokratis dan terbuka tersebut sesuai dengan AD/ART masing-masing partai politik. Bahkan tidak ada kewajiban bagi partai politik untuk melaporkan atau melampirkan mekanisme rekrutmen dan seleksi bacaleg tersebut kepada KPU sebagai bukti telah melaksanakan kewajiban yang diatur dalam UU dan PKPU. Transparansi partai politik dalam seleksi bacaleg masih rendah. Hanya PSI dan Partai Demokrat yang terdapat pemberitaan yang masif mengenai informasi seleksi bacaleg partai politik. Transparansi yang rendah mengindikasikan kurangnya kualitas pelaksanaan demokrasi di Indonesia (puspitasari, demokratisasi rekrutmen partai politik, 2019).

F. Kerangka Teori

1. Manuver Politik

Isitilah manuver diperkirakan muncul pada pertengahan abad ke-18, dari bahasa perancis "*meneuvre*" yang berarti pekerjaan yang dilakukan dengan tangan. Namun ada pula yang

meyakini jika asal mula istilah manuver berasal dari bahasa latin “*manuopera / manuoperare*” yang berarti melakukan pekerjaan secara manual. Menurut Jhon M. Echols manuver adalah suatu bentuk gerakan, tipu muslihat, kelicikan, ataupun siasat (Jhon M. Echols).

Manuver Politik adalah istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu Manuver dan Politik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manuver diartikan sebagai gerakan yang tangkas dan cepat dari pasukan dalam perang, dan manuver dalam bidang politik diartikan sebagai gerakan yang cepat dalam urusan politik. Sedangkan politik sendiri menurut Prof. Miriam Budiardjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan dari tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, dapat dikatakan bahwa politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan negara maupun proses pengambilan keputusan ketatanegaraan (Budiardjo, 2008). Sedangkan menurut Johann Kaspar Bluntschli, Politik adalah ilmu yang memerhatikan masalah kenegaraan, dengan memperjuangkan pengertian dan pemahaman tentang negara dan keadaannya, dalam politik terdapat tujuan untuk mengamati tindakan hukum atas fakta-

fakta dan mempertimbangkan bagaimana menghindari konsekuensi yang merugikan bagi negara dan memperbaiki cacat pengaturan yang ada (Bluntschli, 2000 p.13).

Sehingga manuver politik dapat diartikan sebagai tindakan atau gerakan politik yang berhubungan dengan negara maupun proses pengambilan keputusan yang dilakukan untuk mencapai maksud politik tertentu dengan tujuan untuk merebut kekuasaan secara cepat dan tangkas.

2. Pelembagaan Partai Politik

Studi tentang pelembagaan partai politik pertama kali diperkenalkan oleh Samuel P. Huntington pada tahun 1976 dalam karyanya yang berjudul *Political Order in Changing Societies*. Huntington mendefinisikan pelembagaan sebagai proses di mana suatu organisasi menentukan tatacara untuk memperoleh nilai buku dan stabil (Huntington, 1983). Lebih dari 20 tahun kemudian Vicky Randall dan Lars Svasand menemukan konsep baru mengenai pelembagaan partai politik.

Randall dan Svasand memahami institusionalisasi atau pelembagaan sebagai proses pematapan partai politik dalam aspek structural dan kultural di mana aspek tersebut terwujud dalam pola

perilaku serta dalam sikap dan budaya (Svasand, 2002). Ramlan Surbakti mengartikan pendapat Randall dan Svasand sebagai proses pematangan partai politik baik dalam wujud perilaku yang memola maupun dalam sikap dan budaya. Artinya, partai politik akan terlihat melembaga dengan baik apabila partai politik tersebut mapan dalam hal-hal pola perilaku, sikap, dan budaya secara terintegrasi (Surbakti, 2003).

Randall dan Svasand kemudian membagi proses pelembagaan partai politik menjadi dua aspek yaitu aspek internal-eksternal dan aspek struktural-kultural. Bila kedua aspek ini dipersilangkan, hasil persilangan pertama antara aspek internal dan struktural disebut kesisteman (*systemness*). Kedua, persilangan antara aspek internal dan kultural yaitu identitas nilai (*value infusion*). Ketiga, persilangan antara aspek eksternal dan struktural yaitu otonomi sebuah partai dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*). Keempat, persilangan antara aspek eksternal dan kultural menghasilkan derajat citra partai di mata publik (*reification*) (Svasand).

Ramlan Surbakti menjelaskan pelembagaan partai politik ini dengan mengelaborasi pemikiran Vicky Randall, yaitu :

a. Derajat kesisteman partai politik

Derajat kesisteman partai politik, yang menurutnya adalah proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik yang dirumuskan secara komprehensif dan rinci sehingga mampu berfungsi sebagai kaidah dan prosedur penuntun perilaku dalam melaksanakan semua fungsi partai politik. Suatu partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi kesisteman bila partai politik melaksanakan fungsinya semata-mata menurut AD/ART yang dirumuskan secara komprehensif dan rinci itu.

b. Identitas Nilai Partai Politik

Identitas nilai partai politik, yang dikatakannya berkaitan dengan orientasi kebijakan dan tindakan partai politik menurut ideologi atau platform partai, yaitu pola dan arah kebijakan yang diperjuangkan partai politik dan basis sosial pendukungnya. Menurutnya, lapisan sosial atau golongan masyarakat memberi dukungan kepada suatu partai karena mereka mengidentifikasi orientasi politiknya dengan

ideologi atau platform partai politik dapat dikatakan telah melembaga dari segi identitas nilai apabila partai itu telah memilih lapisan sosial atau golongan masyarakat sebagai pendukung loyal (basis sosial) karena pola dan arah kebijakan yang diperjuangkannya dan bila dukungan yang diberikan kepada partai itu bukan semata-mata karena menerima materi tertentu dari partai tetapi karena orientasi politiknya sesuai ideologi atau platform partai tersebut.

- c. Derajat otonomi suatu partai politik dalam pembuatan keputusan

Derajat otonomi suatu partai politik dalam pembuatan keputusan, yang disekutkannya berkaitan dengan hubungan partai dengan aktor di luar partai, baik dengan sumber otoritas tertentu (penguasa, pemerintah), maupun dengan sumber dana (pengusaha, penguasa, negara atau lembaga luar), dan sumber dukungan massa (organisasi masyarakat). Rumusan ini sejalan dengan framing yang diberikan Huntington tentang otonomi partai sebagai salah satu kriteria pelembagaan. Suatu partai akan memiliki otonomi dalam pembuatan keputusan bila dana untuk membiayai kegiatan partai berasal dari iuran anggota, kontribusi pengurus, dan aktivis di luar iuran.

d. Derajat Pengetahuan Publik

Derajat Pengetahuan Publik tentang partai politik merujuk pertanyaan apakah keberadaan partai politik itu telah tertanam pada imajinasi publik seperti dimaksudkan partai politik itu. Suatu partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi pengetahuan publik bila masyarakat umum mendefinisikan sosok dan kiprah partai politik itu sesuai identitas nilai (platform) partai itu sehingga masyarakat pun dapat memahami (meskipun belum tentu setuju) mengapa suatu partai politik melakukan jenis tindakan tertentu dan tidak melakukan jenis tindakan lain.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada hakikatnya ialah melakukan pengamatan terhadap individu-individu dengan cara berdialog langsung untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang hal-hal yang diteliti. Penelitian kualitatif memiliki ciri khusus yakni pandangan subjektif dapat digunakan untuk memahami permasalahan yang diteliti.

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui sumber utama dengan pihak yang terkait di dalam masalah-masalah penelitian dan sesuai keinginan peneliti yang dikaitkan dengan kriteria mengenai topik penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku, skripsi, tesis, koran dan data elektronik dari internet yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pada partai solidaritas Indonesia (PSI) dewan perwakilan wilayah Sumatera Selatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dipadukan dengan teori, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada saat di lapangan. Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi analisa.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literature. Studi literature adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Beberapa yang umum dan layak digunakan adalah buku-buku karya pengarang terpercaya, jurnal-jurnal, skripsi, dan sebagainya yang berkaitan dengan tema pada penelitian ini.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang informan. Wawancara ialah cara yang baik untuk menghidupkan topik riset (salim), menggali pemasalahan-permasalahan yang terkait dengan judul skripsi penulis yang akan ditanyakan kepada narasumber.

Peneliti memilih narasumber yang dianggap layak dalam pemberian data, wawancara sendiri dilakukan dengan Ketua DPW PSI Sumatera Selatan, Ketua DPD PSI Kota Palembang dan Elva salah satu kader PSI Sumatera Selatan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiono, 2017).

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yang menurut I Made Winartha yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang di kumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan (I Made Winartha, 2006).

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu di catat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles & Huberman (1984) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Ibid, 249).

c. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulakn data, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Ibid, 252).

6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN KEPUSTKAAN YANG RELEVAN

Bagian ini khusus membicarakan tentang berbagai materi yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Bab II ini lebih fokus pada kajian dari berbagai pihak secara teoritis tentang fokus masalah yang di angkat.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai objek yang diteliti. Penulis membahas tentang anak muda dalam perpolitikan Indonesia, latar belakang berdirinya PSI, visi dan misi PSI, kegiatan yang dilakukan oleh PSI, dan perkembangannya di dunia politik Indonesia. Hal ini dilakukan guna memahami latar belakang berdirinya partai.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan hasil temuan serta menganalisisnya menggunakan teori partai politik.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA YANG RELEVAN

A. Partai Politik

Partai politik pertama-tama lahir di negara Eropa Barat. Pada awalnya perkembangan partai politik hanya di negara-negara barat seperti Inggris dan Perancis. Kegiatan politik di pusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Sejak masa penjajahan Belanda dan Jepang, macam-macam partai politik yang bertujuan sosial maupun berasaskan agama telah ada di Indonesia. Seperti partai Budi Utomo, Muhammadiyah, Sarekat Islam, PNI, Katolik, Masyumi, dan lain-lain. Hal ini merupakan suatu bentuk manifestasi rakyat Indonesia yang menginginkan Indonesia merdeka dari bangsa asing.

Adapun syarat pembentukan partai politik juga telah di atur sedemikian rupa di dalam UU tentang partai politik. Seperti halnya di dalam pasal 2 ayat 1 tahun 2008 UU partai politik. Telah di jelaskan bahwa, “partai politik di dirikan dan di bentuk paling sedikit 50 orang warga negara Indonesia yang berusia 21 tahun dengan akta notaris” (Undang-undang Partai Politik & Perubahannya, 2011, hal. 11) sehingga setiap kelompok orang tidak sembarangan untuk membentuk suatu partai politiknya sendiri.

Partai politik secara umum dapat di definisikan dengan, sekumpulan kelompok orang yang mempunyai tujuan ataupun kepentingan yang sama. Dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan politik. Biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka (Budiardjo, 2004). Berbagai pengertian atau definisi dari partai politik menurut beberapa para ahli, yaitu:

1. Carl J. Friedrich: Partai Politik adalah “sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materil” (Budiardjo, 2004).
2. R. H. Soltau: “Partai Politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih. Bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka” (Budiardjo, 2004).
3. UU Partai Politik pasal 1 ayat 1 tahun 2008: Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan di bentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan

kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Undang-undang Partai Politik & Perubahannya, 2011, hal. 10).

Partai politik memiliki peranan yang sangat penting di setiap negara yang menerapkan sistem demokrasi. Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses pemerintahan dengan warga negara. Partai politik adalah salah satu bentuk kelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan-pandangan, dan keyakinan yang bebas dalam masyarakat demokratis. Di samping partai politik, bentuk ekspresi lainnya juga terwujud dalam bentuk kebebasan pers, kebebasan berkumpul, ataupun kebebasan berserikat melalui organisasi-organisasi diluar dari partai politik seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi non pemerintah, dan lain-lain. Reformasi pasca orde baru telah menghidupkan kembali demokrasi, pertumbuhan partai politik pada masa ini tidak terhindarkan lagi karena partai politik merupakan pilar dari demokrasi yang harus ada di dalam suatu negara modern.

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berwawasan kebangsaan, partai politik merupakan saluran untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen pemimpin, baik untuk tingkat nasional maupun daerah dan juga untuk rekrutmen pimpinan dari berbagai komponen penyelenggara negara seperti untuk memilih anggota DPR RI dan DPRD yang keanggotaannya berasal dari partai politik.

B. Fungsi Partai Politik

Sistem politik memiliki memiliki beberapa fungsi yang di laksanakan oleh partai politik itu sendiri. Ada fungsi yang menjadi pengendali dari sistem politik tersebut ketika menjalankan sebuah tugas atau wewenangnya. Salah satu utama dari fungsi partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan seperti fungsi rekrutmen dan fungsi-fungsi lain yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Politik

Fungsi pertama yaitu fungsi sosialisasi politik. Yang dimaksud dengan sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dari diri politik masyarakat itu sendiri. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh

sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

Sosialisasi politik dibagi dua, yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses pembelajaran yang diajarkan antara pemberi dan penerima pesan. Dalam proses ini, para anggota masyarakat mempelajari dan lebih mengetahui tentang nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya yang ada. Mulai dari pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik. Cara yang dilakukan dalam proses ini seperti melalui kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi dan keikutsertaan dalam berbagai forum pertemuan.

Sedangkan indoktrinasi politik diartikan sebagai proses sepihak ketika penguasa memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai sesuatu hal yang ideal dan baik. Cara yang dilakukan yaitu dengan melalui kegiatan berbagai forum pengarahan yang penuh paksaan psikologis, dan latihan yang penuh disiplin.

2. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan umum atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam system politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya (surbakti, 2010, hal. 150-151). Dalam artian, fungsi ini adalah fungsi untuk memilih seseorang yang benar-benar mengetahui atau ahli dalam menjalankan peranan dan system politik di sebuah lembaga atau pemerintahan.

Tujuan dari fungsi rekrutmen adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elite yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam.

3. Partisipasi Politik

Partisipasi Politik ialah kegiatan warga Negara biasa dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan (surbakti, 2010, hal. 151). Kegiatan yang di maksud antara lain, mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan,

mengajukan kritik kepada suatu kebijakan umum yang sudah dibuat oleh pemerintah. Partai politik juga memiliki fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat lain untuk menggunakan partai politik sebagai kegiatan mereka untuk mempengaruhi suatu proses politik.

Jadi, partai politik dapat disebut sebagai wadah dalam partisipasi politik. Fungsi ini memiliki porsi yang lebih tinggi dari sistem politik totaliter dalam partai politik, karena fungsi ini lebih mengharapkan ketaatan dari warga daripada aktivitas warganya.

4. Komunikasi Politik

Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintahan kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah (surbakti, 2010, hal. 152-153). Disini partai politik memiliki fungsi yang sangat penting yaitu sebagai komunikator politik. Fungsi ini tidak hanya menyampaikan segala keputusan pemerintah tetapi juga menjalankannya.

Dalam melaksanakan fungsi ini, partai politik tidak begitu saja menyampaikan segala informasi yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat atau dari masyarakat kepada

pemerintah. Tetapi partai politik memiliki cara sendiri agar masyarakat ataupun pemerintah dapat memahami informasi dengan mudah. Partai politik menggunakan konsep dasar dari ilmu komunikasi dimana penerima informasi (komunikan) dapat dengan mudah memahami dan memanfaatkan informasi tersebut.

Dengan kebijakan pemerintah ini segala aspirasi atau pendapat, keluhan dan tuntutan masyarakat sudah dapat diterjemahkan dari bahasa teknis ke bahasa yang dapat dimengerti oleh pemerintah sekarang ini. Jadi, proses komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat dapat berlangsung secara efektif melalui partai politik.

5. Pengendalian Konflik

Dalam arti luas konflik yang dimaksud dari fungsi ini, mulai dari perbedaan pendapat sampai pada pertikaian fisik antar-individu atau kelompok dalam masyarakat. Dalam Negara demokrasi, setiap warga Negara atau kelompok masyarakat berhak menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sehingga konflik merupakan gejala yang sukar. Akan tetapi, suatu sistem politik hanya akan mentolerir atau menerima konflik yang tidak menghancurkan dirinya sehingga permasalahannya tidak

menjadi semakin menambah konflik yang terjadi, melainkan mengendalikan konflik melalui lembaga demokrasi untuk mendapatkan penyelesaian dalam bentuk keputusan politik.

Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik yang kemudian permasalahan ini dibawa ke dalam cara musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan secara politik. Untuk mencapai penyelesaian berupa keputusan politik itu, diperlukan kesediaan berkompromi antara para wakil rakyat, yang berasal dari partai-partai politik. Apabila partai-partai politik keberatan untuk mengadakan kompromi, atau bahkan tidak mengikuti cara musyawarah yang ditetapkan berarti partai politik bukan mengendalikan konflik, melainkan menciptakan konflik dalam masyarakat tersebut. Dengan demikian pada suatu negara demokrasi, peranan partai politik sangatlah di perlukan demi mendukung sistem demokrasi tersebut.

C. Manuver Politik

Manuver politik adalah tindakan atau gerakan politik yang dilakukan untuk mencapai maksud politik tertentu. Manuver politik sebagai tindakan sosial merupakan suatu proses dimana actor secara subjektif terlibat dalam segmen dalam sistem politik. Tindakan sosial yang dimaksud meliputi setiap jenis tindakan manusia yang dengan penuh arti diorientasikan kepada tindakan orang lain.

Menurut Weber bahwa tindakan sosial (Social Action) adalah tindakan yang memiliki makna subjektif (a subjective meaning) bagi dan dari aktor pelakunya (Johnson, 1986). Tindakan sosial adalah seluruh perilaku manusia yang memiliki arti subjektif dari yang melakukannya, baik yang terbuka maupun yang tertutup, yang diutarakan secara lahir maupun secara diam-diam, yang oleh pelakunya diarahkan kepada tujuannya. Sehingga, tindakan sosial itu bukanlah perilaku yang kebetulan, tetapi yang terstruktur atau memiliki pola tertentu dan makna-makna tertentu.

Weber secara khusus mengklarifikasikan tindakan sosial yang memiliki arti-arti subjektif itu ke dalam empat tipe. Pertama instrumentally rational (Zweckrational) yaitu tindakan yang ditentukan oleh harapan-harapan yang memiliki tujuan untuk dicapai itu telah dirasionalisasikan dan dikalkulasikan sedemikian rupa untuk dapat

dikejar atau diraih oleh yang melakukannya. Kedua value rational (Wertrational) yaitu tindakan yang didasari oleh kesadaran keyakinan mengenai nilai-nilai yang penting seperti etika, estetika, agama dan lain-lainnya yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Ketiga, affectual (especially emotional) yaitu tindakan yang ditentukan oleh kondisi kejiwaan dan perasaan yang melakukannya. Dan keempat, traditional yaitu tindakan yang ditentukan kebiasaan-kebiasaan yang telah mendarah daging.

D. Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan suatu sarana demokrasi yang digunakan untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk sebagai anggota legislatif di MPR, DPR, DPD DPRD, dan Presiden serta Wakil Presiden. Konstituen tersebut akan memperjuangkan kepentingan rakyat dan daerahnya. Pemilihan Umum (PEMILU) juga merupakan sarana dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar“. Makna dari kedaulatan ditangan Rakyat ini ialah rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk

secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan, guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Menurut teori demokrasi klasik, pemilu merupakan suatu pengganti tahta kekuasaan sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat beralih menjadi kekuasaan negara yang kemudian menjelma dalam bentuk wewenang pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat. Pemilihan umum ini diselenggarakan di negara yang berbentuk Republik seperti Indonesia.

Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia adalah suatu sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejarah dan pelaksanaan pemilu di Indonesia pada awalnya bertujuan untuk memilih anggota legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Pada mulanya, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. Kemudian berdasarkan amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, sehingga pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dimasukkan dalam agenda pemilu.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia diadakan dalam pemilu pertama kali pada tahun 2004, selanjutnya pada tahun 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan menjadi bagian dari agenda pemilu di Indonesia. Di Indonesia, istilah pemilu lebih sering merujuk pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden yang diselenggarakan pada 5 tahun sekali.

Pada era reformasi berkembangnya asas Jujur dan Adil (Jurdil) yang bermakna bahwa pemilihan umum harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang dipilih. Sedangkan asas adil mengandung makna perlakuan yang sama atau adil terhadap peserta pemilu dan pemilih. Tidak terdapat keistimewaan ataupun diskriminasi

kepada peserta ataupun pemilih tertentu. Asas jujur dan adil berlaku untuk pemilih ataupun peserta pemilu dan juga penyelenggara pemilu.

Sepanjang sejarahnya berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah diselenggarakannya 12 kali pemilu anggota legislatif yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Pemilu tersebut diselenggarakan sesuai dengan UUD 1945 yang terdapat pada pasal 18 (3) : pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan Umum. Pasal 19 (1) : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 22E (1) : pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

1. Tujuan Pemilu

Secara umum, tujuan pemilu adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional suatu negara.

2. Manfaat Pemilu

Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta wujud paling kongkret partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu selalu menjadi perhatian utama karena melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Penyelenggaraan pemilu sangatlah penting bagi suatu negara, hal ini disebabkan karena :

- a. Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat.
- b. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan pergantian pemimpin secara konstitusional.
- c. Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi.
- d. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Provinsi Sumatera Selatan

Sumatera Selatan atau biasa disingkat Sumsel merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang terletak di bagian selatan pulau Sumatera. Ibu kota provinsi ini adalah Kota Palembang. Secara geografis, Sumatera Selatan berbatasan dengan provinsi Jambi di utara, provinsi Kep. Bangka-Belitung di timur, provinsi Lampung di selatan dan provinsi Bengkulu di barat.

Provinsi ini kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara. Selain itu, ibu kota Sumatera Selatan yaitu Palembang telah terkenal sejak dahulu karena menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Disamping itu juga, provinsi Sumatera Selatan ini banyak memiliki tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi seperti Sungai Musi, Jembatan Ampera, Pulau Kemaro, Danau Ranau, Kota Pagar Alam dan lain-lain. Karena sejak dahulu telah menjadi pusat perdagangan, secara tidak langsung ikut mempengaruhi kebudayaan masyarakatnya. Makanan khas dari provinsi ini sangat beragam, diantaranya adalah pempek, model, tekwan, pindang patin, pindang tulang, sambal jokjok, berengkes dan tempoyak.

Tabel 3.1 Daftar Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Sumber

No.	Wilayah	Pusat Pemerintahan
1.	Kab. Banyuasin	Pangkalan Balai
2.	Kab. Empat Lawang	Tebing Tinggi
3.	Kota Lubuk Linggau	Lubuk Linggau
4.	Kota Pagar Alam	Pagar Alam
5.	Kota Palembang	Palembang
6.	Kota Prabumulih	Prabumulih
7.	Kab. Lahat	Lahat
8.	Kab. Muara Enim	Muara Enim
9.	Kab. Musi Banyuasin	Sekayu
10.	Kab. Musi Rawas	Muara Beliti Baru
11.	Kab. Musi Rawas Utara	Rupit
12.	Kab. Ogan Ilir	Indralaya
13.	Kab. Ogan Komering Ilir	Kota Kayu Agung
14.	Kab. Ogan Kemiring Ulu	Batu Raja
15.	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Muaradua
16.	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Martapura
17.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Talang Ubi

www.sumselprov.go.id

B. Sejarah Partai Solidaritas Indonesia

Partai Solidaritas Indonesia atau disingkat PSI adalah partai politik baru yang didirikan pada tanggal 16 November 2014 berdasarkan Akta Notaris Widyatmoko, SH No.14 Tahun 2014. Pada tanggal 2014, Dewan Pimpinan Pusat PSI (DPP PSI) mengajukan secara resmi surat pendaftaran sebagai partai politik. Kemudian Kementerian Hukum dan HAM secara resmi meminta DPP PSI untuk melengkapi syarat-syarat pembentukan partai politik sesuai Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Melengkapi syarat-syarat pembentukan partai politik inilah yang menjadi tugas suci pengurus PSI disemua level kepemimpinan guna memastikan PSI lolos verifikasi di Kementerian Hukum dan HAM yang akan berlangsung sekitar pertengahan tahun 2016.

Demokrasi meletakkan peran sentral partai politik sebagai wadah yang menyalurkan dan mengagregasi aspirasi, tuntunan dan harapan rakyat. Melalui para kadernya di legislatif dan eksekutif, kebijakan menyangkut hidup orang banyak diputuskan. Politik yang mengatur kebijakan untuk bersama, sejatinya adalah tugas moral-suci partai politik. Namun kebijakan partai politik yang harusnya bermuara pada kepentingan segelintir elit. Rahim partai politik masih pelit melahirkan pemimpin (gubernur/bupati/walikota) pro rakyat yang

jumlahnya masih dapat dihitung dengan jari. Partai-partai politik yang ada sekarang telah terjebak kepada kepentingan rantai ekonomi-politik antar-elit partai yang lain saling berkelindan.

Dalam konteks ini persepsi negative dan apatisme politik di tengah masyarakat wajar saja berkembang. Namun, seperti yang dikatakan Arief Budiman, seorang intelektual-aktivis “(Tapi) system kepartaian merupakan inti dari system politik yang demokratis. Memusuhi partai sebagai system sama saja dengan menghancurkan demokrasi. Yang harus kita musuhi adalah orang-orang yang sekarang ada di partai politik.” Kehadiran partai baru bisa dijadikan solusi alternatif. Sebuah partai yang dapat memutus rantai tali-temali kepentingan ekonomi-politik elit yang tak segan mengorbankan kepentingan rakyat. Tentu saja partai baru yang benar-benar baru. Partai baru yang menawarkan kebaruaran dari segala perspektif dan aksi politik. Bukan partai baru yang mengaku baru tapi sejatinya hasil daur ulang spriti partai-partai lama.

PSI berkeyakinan, partai baru adalah sebuah kebutuhan, karena PSI percaya bahwa sirkulasi kekuasaan tanpa diisi oleh sirkulasi generasi hanya akan menjadi ajang reproduksi masa lalu, tanpa ada sesuatu yang benar-benar baru. Lebih jauh, PSI didirikan, untuk menggalang gerakan politik yang dilandasi oleh rasa solidaritas untuk

kemanusiaan. Karena PSI meyakini, sebagaimana Gus Dur meyakini, bahwa yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Politik harus ditopang oleh kemanusiaan, begitu juga kemanusiaan harus ditopang oleh solidaritas sesama anak bangsa. Di atas pendirian politik seperti itu, PSI mulai membangun dan mempersiapkan diri sebagai partai masa depan.

C. Visi dan Misi Partai Solidaritas Indonesia

a. Visi Partai Solidaritas Indonesia

“Indonesia yang berkarakter kerakyatan, berkemanusiaan, berkeragaman, berkeadilan, berkemajuan dan bermartabat.”

b. Misi Partai Solidaritas Indonesia

1. Menggalang kekuatan nasional melalui sebuah kepemimpinan politik yang ideologis, terorganisir dan terstruktur.
2. Menggalang perjuangan politik dengan nilai solidaritas nasional melanjutkan agenda reformasi dan demokratisasi.
3. Membangun kembali semangat republikanisme, merajut kembali rasa kebangsaan yang terserak, menanam kembali benih-benih idealism, mendirikan kembali benteng-benteng kebhinekaan dan membangun kembali pondasi gotong royong.

4. Mendorong martabat Indonesia dalam pergaulan internasional, sesuai prinsip politik bebas aktif dengan melihat kondisi geopolitik internasional yang sedang berkembang.

D. Nilai Dasar Karakter Partai Solidaritas Indonesia

1. Kebajikan

Politik adalah sumber kebajikan, sumber kebaikan bagi kepentingan orang banyak. Demokrasi meletakkan peran sentral partai politik sebagai institusi yang bertugas mendengar dan menyalurkan aspirasi rakyat, termasuk menjadi rahim yang melahirkan pemimpin-pemimpin masyarakat. Seluruh orientasi dan kerja politik PSI difokuskan untuk menggagas dan memutuskan kebijakan yang membawa kebaikan bagi rakyat.

2. Keragaman

Prinsip keragaman merupakan sumber kekuatan Indonesia. Dalam keragaman, nilai-nilai solidaritas yang merekatkan masyarakat tidak hanya berbentuk ikatan emosional ke dalam kelompok sendiri yang bersumber dari keragaman agama, etnik, bahasa dan pengalaman sejarah. Lebih dari itu, perekat solidaritas adalah rasa saling ketergantungan yang menjembatani hubungan antar kelompok, antar agama, antar etnik dan antar bangsa.

3. Keterbukaan

PSI menjunjung tinggi nilai-nilai keterbukaan baik dalam hal berhubungan dengan dunia luar maupun tata laksana pemerintahan. Keterbukaan memungkinkan Indonesia menjadi warga dunia yang setara dan sama-sama berkontribusi terhadap kemakmuran perdamaian dunia, memungkinkan Indonesia mampu bekerja sama dan saling belajar dengan bangsa-bangsa lain, sekaligus memberi tempat untuk terus melakukan kritik dan pembaruan.

4. Meritokrasi

PSI berupaya mewujudkan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mencapai dan memperoleh sesuatu dengan kemampuan dan usahanya. Nilai *meritokrasi* menghargai kinerja dan memberi kesempatan yang adil bagi setiap orang untuk bekerja keras mencapai kemungkinan yang tak terduga. Penerapan nilai-nilai *meritokrasi* dalam urusan publik akan membebaskan kita dari jerat kolusi dan nepotisme.

E. Logo Partai Solidaritas Indonesia

Logo Partai Solidaritas Indonesia terinspirasi dari ucapan salah satu pendiri bangsa ini yaitu presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno pada saat pidatonya pada tanggal 29 Juli 1956 di Semarang "Bunga

mawar tidak mempropagandakan harum semerbaknya, dengan sendirinya harum semerbaknya itu tersebar di sekelilingnya.” Dari sepenggal kalimat itulah yang kemudian PSI terinspirasi untuk mewujudkannya menjadi logo Partai Solidaritas Indonesia.

3.1 Gambar Logo Partai Solidaritas Indonesia (PSI)



Sumber: <https://psi.id/>

Partai Solidaritas Indonesia ini berlambangkan segi empat merah dengan gambar kepan tangan menggenggam bunga mawar berwarna putih, bertuliskan PSI dengan huruf P yang terbuka. Arti lambing Partai Solidaritas Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Warna dasar merah melambangkan keberanian, warna putih melambangkan kesucian dan kejujuran, warna hitam melambangkan kesetiaan, solidaritas dan kekuatan.

2. Tulisan PSI merupakan singkatan dari partai solidaritas Indonesia. Dengan huruf P yang terbuka, menunjukkan PSI adalah partai terbuka.
3. Bunga mawar putih adalah lambang solidaritas internasional dengan gagasan demokrasi substantif yang juga termaktub dalam UUD 1945.
4. Lima kelopak luar melambangkan Pancasila dan Tiga kelopak dalam menunjukkan Trisakti.
5. Kepalan tangan putih melambangkan tekad yang suci, optimis, pantang menyerah dan selalu kuat memegang teguh prinsip dan cita-cita bangsa.
6. Warna merah sebagai latar belakang menunjukkan bahwa PSI selalu berani dalam setiap gerakan politiknya, tanpa pernah gentar pada siapapun yang coba menghalangi cita-cita bangsa Indonesia.

F. Syarat Menjadi Kader dan Pengurus Partai Solidaritas Indonesia

Kebaruan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dapat diindikasikan dari karakter dan nilai dasar yang dianut PSI yang sekaligus menjadi syarat dapat bergabung dengan PSI.

1. Partai Baru dengan Aktivis Politik Baru

PSI adalah partai baru yang dikelola oleh para aktivis politik baru yang sebelumnya tidak pernah menjadi pengurus harian partai

apapun. Ini adalah cara sadar PSI sebagai Partai baru untuk memutus mata rantai dari perilaku, spirit dan tradisi buruk partai-partai politik lama.

2. Partai Baru dengan Aktivis Politik Muda

PSI adalah partai baru yang dikelola aktivis muda berusia di bawah 45 tahun. Dalam praktiknya, kader-kader PSI yang sudah bergabung rata-rata berusia 30 tahunan. Ini adalah cara PSI untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda bangsa untuk terlibat aktif dalam menentukan masa depan bangsa. Ini juga cara PSI menolak politik gerontokrasi: politik yang didominasi orang-orang tua secara usia yang mengelola politik dengan cara-cara ‘tua dan usang’.

3. Partai Baru yang Inklusif dan Pluralis

PSI adalah partai baru yang terbuka (inklusif dan pluralis) bagi seluruh anak negeri tanpa memandang latar belakang suku, agama dan ras mereka. Spirit inklusivitas dan pluralitas PSI juga tergambar dari pola rekrutmen kader PSI yang akan mengabdikan di lembaga Legislatif dan Eksekutif dengan mengedepankan kriteria objektif – rasional ketimbang kriteria primordial berbasis kesukuan atau keagamaan.

4. Partai Baru yang Ramah Anak dan Perempuan

PSI adalah partai baru yang keputusan-keputusan politiknya dioorientasikan kepada perbaikan kualitas hidup sosial politik anak dan perempuan. PSI secara konsisten membangun struktur organisasinya dengan memberikan porsi yang besar bagi perempuan untuk menjadi pengurus PSI. ini dibuktikan dengan aturan yang ketat mengenai jumlah minimal 30% perempuan dalam kepengurusan PSI. bahkan PSI berupaya untuk mencapai angka minimal 40% pengurus perempuan di setiap tingkatan. Dibuktikan dengan angka 60% kepengurusan perempuan di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

5. Partai Baru yang Ramah Lingkungan

PSI adalah partai baru yang berorientasi 'hijau', dimana kebijakan pembangunan selalu dilandaskan kepada keberpihakan kepada konservasi lingkungan hidup demi terwujudnya kehidupan yang berkelanjutan.

6. Partai Baru yang Modern

PSI adalah partai baru yang modern, karena (1) menganut nilai-nilai kemanusiaan modern seperti penegakan demokrasi dan pembelaan terhadap hak asasi manusia; (2) mempercayai ilmu

pengetahuan dan oleh karena itu seluruh kebijakan diambil berdasarkan hasil penelitian yang mendalam. PSI juga mempercayai survey yang mempergunakan metodologi yang sah sebagai cara menampung aspirasi masyarakat; (3) mempergunakan teknologi informasi dalam manajemen internal partai dan kampanye publiknya.

G. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Sumatera Selatan

Seiring dengan disahkannya PSI sebagai partai politik, PSI langsung membentuk semua jaringan dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga kelurahan. Selain untuk memperkuat struktur partai hal ini juga merupakan persyaratan dari KPU untuk lolos sebagai partai yang ikut dalam pemilu 2019. DPW PSI Sumsel sendiri telah terbentuk pada November 2014 saat terjadinya MOU antara sekretaris dan pimpinan pusat yaitu Ika Febrianty, S.Sos dan Shalahuddin Al Khairi, S.Sos selaku pendiri PSI DPW Sumsel yang pada saat itu masing-masing sebagai sekretaris dan wakil sekretaris PSI DPW Sumsel.

Dalam hal untuk mengikuti verifikasi faktual dan untuk memenuhi syarat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), PSI DPW Sumsel juga memperluas

jaringan hingga ke daerah-daerah kabupaten/kota. Pada saat itu PSI DPW Sumsel memiliki 17 DPD yang tersebar diseluruh daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Namun, pada saat sekarang ini PSI DPW Sumsel memiliki 6 pengurus DPD yang terisi. Berikut adalah daftar DPD beserta nama ketua umumnya.

Tabel 3.2 daftar DPD PSI yang ada saat ini beserta ketua umumnya

No.	DPD PSI	Ketua Umum
1.	Kota Palembang	Toni S.Kom
2.	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Toni Syamsuddin
3.	Kabupaten Empat Lawang	Jauhari
4.	Kabupaten Lahat	Sutami
5.	Kabupaten Banyuasin	Indra Setiawan
6.	Kabupaten Ogan Ilir	Alamsyah

Walaupun dapat dikatakan sebagai partai baru dan belum termasuk dalam partai peserta pemilu pada Pilkada serentak 2018, namun Partai PSI DPW Sumsel telah banyak dilirik oleh bakal calon kepala daerah. Pilkada serentak yang akan berlangsung di 9 Kabupaten/Kota di Sumsel dan satu Pilgub Sumsel, sudah ada sejumlah calon yang datang untuk meminta dukungan.

Dalam Pilkada Lubuklinggau, DPW PSI Sumsel mengeluarkan surat keputusan dukungan terhadap petahana pada Pilkada Lubuklinggau. Selain dari Lubuklinggau, di Sumsel sendiri bakal calon dari partai Demokrat yang juga wakil Gubernur Sumsel, H Ishak Mekki juga sudah merapatkan diri ke PSI, namun PSI tetap terbuka untuk calon lain. Disamping itu, PSI fokus pada verifikasi KPU dan mempersiapkan bakal calon legislatif untuk pemilihan legislatif 2019 (Plembang Ekspres, 2018).

Setelah resmi diumumkan oleh KPU pusat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai partai peserta pemilu lolos memenuhi syarat (MS) dan mendapatkan nomor 11. DPW PSI Sumsel juga telah mengikuti verifikasi faktual dan dinyatakan memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Partai yang diketuai oleh Grace Natalie ini selanjutnya mulai membuka pendaftaran bakal calon legislatif (Bacaleg). DPW PSI Sumsel sudah membentuk tim panel independen yang melakukan uji kompetensi terhadap bakal calon anggota legislatif. Kriteria bakal calon legislatif yang lulus di antaranya adalah presentasi dengan bahan tulisan tentang komitmen bakal calon legislatif untuk anti korupsi dan anti intoleransi. Sehingga yang terpilih nantinya dapat menjadi calon legislatif yang layak dijual di tengah masyarakat dan terpenting sosok

tersebut memiliki semangat untuk anti Korupsi. Dengan harapan nantinya jika calon legislatif tersebut terpilih maka diharapkan dapat mengemban amanat dengan baik sampai akhir masa jabatan.

Dalam hal elektabilitas PSI cenderung stabil untuk ukuran partai baru, elektabilitas PSI pada Desember 2018 tercatat menguat 1% dibandingkan dua bulan sebelumnya. Elektabilitas PSI lebih tinggi dibandingkan dengan partai-partai baru yang menjadi peserta pemilu 2019, disusul dengan Partai Perindo sebesar 2,5%, lalu Partai Berkarya sebesar 0,8%, dan terakhir ada Partai Garuda sebesar 0,5%.

Tabel 3.3 Elektabilitas Partai Baru Peserta Pemilu 2019 (Desember 2018)

PSI	2,6%
Perindo	2,5%
Berkarya	0,8%
Garuda	0,5%

Sumber: survey Y-Publica / dirilis pada 14 desember 2018)

Menurut survei Y-Publica elektabilitas tertinggi di dapil Sumatera Selatan 1 masih dipegang calon legislatif petahana asal Golkar, Kahar Muzakir dengan 9,4 persen. Disusul petahana lainnya, Edhy Prabowo dari Gerindra (7,6 persen). Muka-muka lama masih mendominasi perebutan kursi DPR RI di Dapil Sumatera Selatan I.

Meski begitu, calon legislatif dari partai pendatang baru seperti PSI ternyata tetap berpeluang lolos. Calon legislatif pendatang baru dari PSI berpeluang mematahkan dominasi dinasti politik di dapil Sumsel 1, Mantan jurnalis televisi Rizki Hidayatullah menyumbangkan satu kursi untuk PSI dengan elektabilitas 3,6 persen (Survei: PSI Tembus Dominasi Dinasti Politik di Sumsel I, 2019).

H. Perolehan Suara PSI DPW Sumsel pada Pemilu 2019

Tabel 3.4 Perolehan Suara PSI DPW Sumsel Di Setiap Kabuapten/Kota

No.	Wilayah	Jumlah Suara
1.	Kab. Banyuasin	2.409
2.	Kab. Empat Lawang	160
3.	Kota Lubuk Linggau	1.966
4.	Kota Pagar Alam	240
5.	Kota Palembang	19.981
6.	Kota Prabumulih	260
7.	Kab. Lahat	140
8.	Kab. Muara Enim	1.002
9.	Kab. Musi Banyuasin	1.233
10.	Kab. Musi Rawas	2.110
11.	Kab. Musi Rawas Utara	281
12.	Kab. Ogan Ilir	563
13.	Kab. Ogan Komering Ilir	769
14.	Kab. Ogan Kemiring Ulu	961
15.	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	102
16.	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	295
17.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	283

Sumber: pemilu2019.kpu.go.id

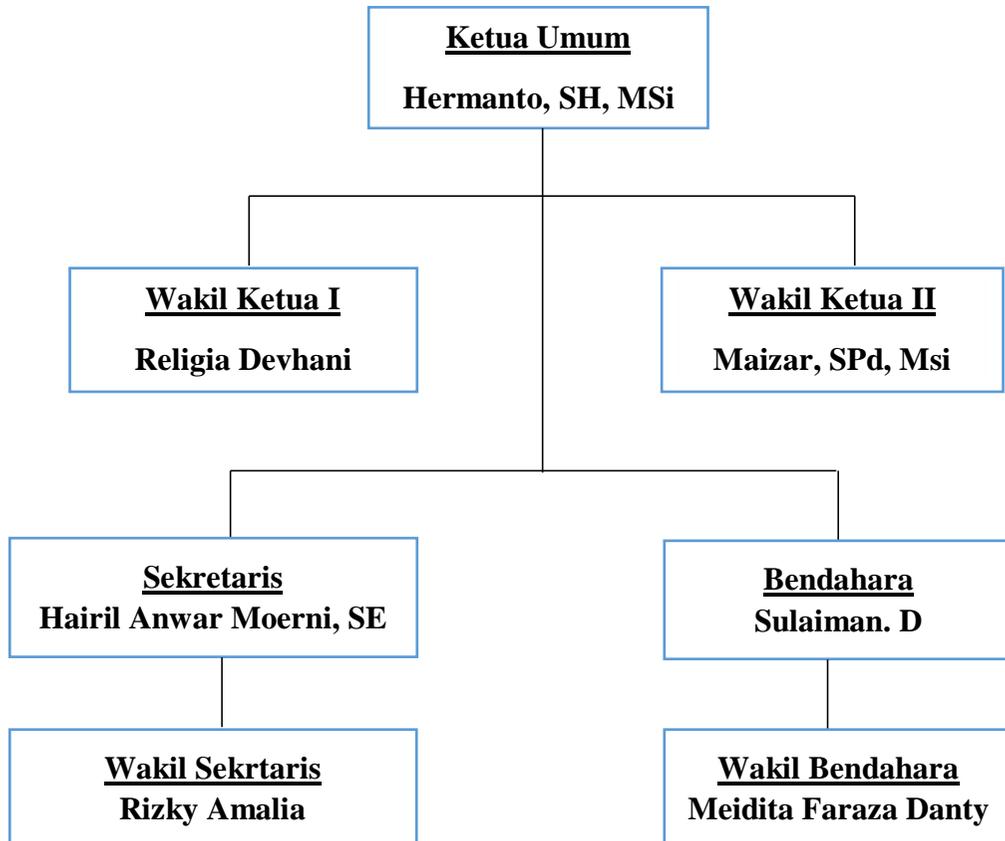
Gambar 3.2

Hasil Perolehan Suara Pemilu DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019

		Pemilihan Umum DPRD Provinsi Sumatera Selatan							
		17 April 2019							
	Partai Politik	Suara		Kursi		Perubahan			
						% Suara	Kursi		
3	 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	594.762	13,42%	11	14,67%	↓ 4,08%	↓ 2		
4	 Partai Golongan Karya	573.750	12,94%	13	17,33%	↓ 0,50%	↑ 3		
2	 Partai Gerakan Indonesia Raya	535.564	12,08%	10	13,33%	↑ 2,40%	↔		
14	 Partai Demokrat	467.955	10,56%	9	12,00%	↓ 0,04%	↓ 2		
1	 Partai Kebangkitan Bangsa	376.105	8,48%	8	10,67%	↑ 0,79%	↑ 2		
5	 Partai NasDem	348.015	7,85%	6	8,00%	↑ 0,90%	↑ 1		
12	 Partai Amanat Nasional	335.889	7,58%	5	6,67%	↓ 2,17%	↓ 1		
8	 Partai Keadilan Sejahtera	304.506	6,87%	6	8,00%	↓ 0,15%	↑ 1		
13	 Partai Hati Nurani Rakyat	273.153	6,16%	3	4,00%	↓ 0,90%	↓ 2		
9	 Partai Persatuan Indonesia	171.711	3,87%	3	4,00%	↑ 3,87%	↑ 3		
10	 Partai Persatuan Pembangunan	154.458	3,48%	1	1,33%	↓ 1,71%	↓ 1		
7	 Partai Berkarya	111.783	2,52%	0	0,00%	↑ 2,52%	↔		
19	 Partai Bulan Bintang	99.890	2,25%	0	0,00%	↓ 1,66%	↓ 2		
11	 Partai Solidaritas Indonesia	47.548	1,07%	0	0,00%	↑ 1,07%	↔		
6	 Partai Gerakan Perubahan Indonesia	23.196	0,52%	0	0,00%	↑ 0,52%	↔		
20	 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	14.598	0,33%	0	0,00%	↓ 0,88%	↔		
Jumlah Suara Sah		4.432.883	89,85%	75	100,00%				↔
Jumlah Suara Tidak Sah		500.991	10,15%						
Partisipasi Pemilih		4.933.874	81,39%			↑ 4,40%			
Tidak Menggunakan Hak Pilih		1.128.117	18,61%			↓ 4,40%			
Jumlah Pemilih Terdaftar		6.061.991	100,00%						

Sumber: KPU Provinsi Sumatera Selatan

**I. Struktur Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI
Sumatera Selatan**



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti membahas analisis dari hasil penelitian manuver Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dewan pengurus wilayah Sumatera Selatan dalam putaran pemilu tahun 2019. Manuver yang dilakukan PSI pada putaran pemilu tahun 2019 dan juga menjadikan anak muda sebagai basis kekuatan politiknya sehingga menimbulkan hal yang menarik untuk diteliti. Dengan menggunakan teori Randall dan Svasand yang memahami institusionalisasi atau pelebagaan sebagai proses pematapan partai politik dalam aspek structural dan kultural di mana aspek tersebut terwujud dalam pola perilaku serta dalam sikap dan budaya (svasand, 2002). Dimana Ramlan Surbakti mengartikan bahwa partai politik akan terlihat melembaga dengan baik apabila partai politik tersebut mapan dalam hal-hal pola perilaku, sikap, dan budaya secara terintegrasi (Surbakti, 2003).

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, peneliti dapat menjawab latar belakang masalah dengan menggunakan teori pelebagaan partai politik yang dianggap mampu menganalisis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui manuver Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Sumatera Selatan dalam putaran pemilu 2019.

A. Manuver Politik PSI Pada Pemilu 2019

Manuver politik adalah tindakan atau gerakan politik yang dilakukan untuk mencapai maksud politik tertentu. Manuver politik sebagai tindakan sosial merupakan suatu proses dimana aktor secara subjektif terlibat dalam segmen dalam sistem politik. Tindakan sosial yang dimaksud meliputi setiap jenis tindakan manusia yang dengan penuh arti diorientasikan kepada tindakan orang lain. Dalam teori pelebagaan partai politik menurut Randall dan Svanson yang memahami institusionalisasi atau pelebagaan hal ini ditinjau dari dua aspek yaitu :

1. Aspek kultural

Dalam perjalanan demokrasi di Indonesia, partai politik mempunyai peran penting dalam menyampaikan aspirasi dan juga kepentingan politik dalam sistem politik. Partai politik menjadi sarana bagi masyarakat untuk menjadi penyambung lidah antara rakyat dengan pemerintah serta turut aktif dalam membuat kebijakan bagi masyarakat.

Selain itu perkembangan demokrasi di Indonesia baik ditingkat daerah hingga ditingkat pusat mengalami perubahan dengan tuntutan reformasi yang melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah, serta pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik tingkat II, I dan pusat yang dipilih secara langsung melalui pemilihan di DPRD dan DPR. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat secara langsung tersebut merupakan konsekuensi terhadap perubahan dalam tatanan kenegaraan di Indonesia akibat adanya amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 (Abdullah, 2007).

Dengan adanya amandemen UUD 1945 yang melakukan pemilihan secara langsung atau biasa disebut dengan pemilihan umum (Pemilu) yang bertujuan untuk memilih para calon wakil rakyat ditingkat daerah hingga pusat dan memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, banyak sekali bermunculan partai politik baru. Partai politik yang masing-masing memiliki visi misi dan ideologi berlomba-lomba untuk merebut hati masyarakat dengan tampil di depan publik.

Pada pemilu tahun 2019 ada Empat Belas peserta partai politik yang ikut berkompetisi pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditingkat Kabupaten/Kota, Provinsi hingga pusat. Berikut adalah peserta pemilu partai politik beserta

nomor urut dan nama ketua umum dari empat belas partai politik pada tahun 2019.

Tabel 4.1 Nomor Urut, Nama Partai Politik dan Nama Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019

No.	Nama Partai Politik	Nama Ketua Umum
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Muhaimin Iskandar
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Prabowo Subianto
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Megawati Soekarnoputri
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	Airlangga Hartanto
5.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Surya Paloh
6.	Partai Garuda	Ahmad Ridha Sabana
7.	Partai Berkarya	Neneng A Tutty
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Sohibul Iman
9.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Harry Tanoesoedibyo
10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Romahurmuzyi
11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Grace Natalie
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	Zulkifli Hasan
13.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Oesman Sapta Odang
14.	Partai Demokrat	Susilo Bambang Yudhoyono

(Sumber : Data KPU, 2018)

Dari Empat Belas partai politik peserta pemilu tahun 2019 ada empat partai politik yang dikategorikan relatif baru berdiri dan juga baru pertama kali mengikuti pemilu legislatif, salah satunya

adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dimana PSI berdiri pada tanggal 16 November 2014. Sebagai partai baru yang pertama kali ikut dalam kontestasi pemilu tahun 2019, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dituntut untuk melakukan langkah-langkah strategis agar mendapat simpati dari masyarakat untuk meraih suara kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Pada saat ini partai politik di Indonesia diberikan ruang gerak yang luas untuk mengontrol kegiatan yang ada di masyarakat. Selain mengontrol dan memberikan edukasi kepada masyarakat, partai politik juga harus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak-hak politiknya untuk menjalankan sistem politik agar berjalan dengan baik. Tapi pada saat ini sudah jarang ditemukan partai politik yang menjadi penyambung aspirasi masyarakat ke pemerintahan, melainkan hanya untuk menjadi kendaraan politik untuk mendapatkan kepentingan dan kekuasaan semata.

Seperti yang disampaikan dalam wawancara pada tanggal 15 Maret 2021 oleh bapak Sulaiman selaku Bendahara Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Sumatera Selatan menyatakan bahwa:

“DPW Sumsel melakukan sosialisasi dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sosial seperti bakti sosial, mengadakan acara-acara kebersihan lingkungan, kegiatan-kegiatan kepemudaan, bagi-bagi sembako dan lain-lain.”

Menurut pernyataan informan diatas peneliti memahami bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Sumatera Selatan melakukan program-program sosial dengan langsung terjun ke masyarakat melakukan bakti sosial, melakukan pembersihan lingkungan di pasar, di masjid dan lingkungan lainnya dengan mengajak kerjasama masyarakat setempat dan menawarkan program-program dengan cara door to door dengan tujuan agar tersampainya pesan secara langsung.

PSI sebagai salah satu partai politik peserta pemilihan umum yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mempersiapkan diri dengan ciri khas tertentu. PSI sebagai partai politik baru harus dapat membedakan diri dengan partai yang lainnya, sehingga bisa memperkenalkan partai ini kepada masyarakat. PSI juga ingin merubah pola pikir masyarakat yang selama ini memiliki perspektif negatif terhadap partai politik.

Seperti yang disampaikan dalam wawancara pada tanggal 15 Maret 2021 oleh bapak Hermanto selaku Ketua Umum Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Sumatera Selatan menyatakan bahwa:

“ini sebetulnya bukan salah politik, politik itu kan alat, alat untuk mencari pemimpin itu ialah partai, prosesnya itu ialah politik, yang katanya kejam itu oknumnya. Tetapi ini bisa di hindari apabila ketua partainya betul-betul bersih, jadi ketika ketua partainya menginstruksikan anak-anak partainya yang menjadi anggota DPR, yang menjadi kepala daerah menginstruksikan harus setor ke partai ya akibatnya menjadi seperti itu, saling makan kawan lawan. Kalau di PSI tidak, di PSI kalau jadi anggota DPR tidak di pungut setoran apapun termasuk gajinya tidak dipotong sepeserpun tetapi prinsip siapa yang melakukan korupsi itu disikat habis atau di pecat”

Menurut pernyataan informan diatas peneliti memahami bahwa PSI DPW Sumsel memberikan edukasi dengan cara membangun pola pikir masyarakat bahwa politik itu tidaklah kotor seperti apa yang ada dipikiran masyarakat pada umumnya dan PSI menjadikan kadernya untuk anti terhadap korupsi dengan tidak adanya dilakukan pungutan kepada para calon anggota DPR agar terbangunnya pola pikir masyarakat.

Selain untuk meraih perolehan suara pada saat pemilu, pemilihan calon anggota legislatif yang dilakukan suatu partai politik dapat mempengaruhi suatu pola pikir yang dibangun masyarakat terhadap partai tersebut. Dalam penentuan calon legislatif pada Pemilu tahun 2019, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Sumatera Selatan

melakukan tahapan-tahapan seleksi demi tercapainya citra partai dimasyarakat.

Seperti yang disampaikan dalam wawancara pada tanggal 15 Maret 2021 oleh bapak Hermanto selaku Ketua Umum Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Sumatera Selatan menyatakan bahwa:

“Cara PSI untuk menentukan calon legislatif di seluruh Indonesia sudah menjadi umum, kita terbuka untuk siapapun yang penting memenuhi syarat secara hukum. Tapi ada beberapa yang menjadi prinsip di PSI pertama PSI anti korupsi dan bukan sekedar perkataan semata, kedua anti intoleransi baik agama apapun, daerah manapun, suku apapun dan tidak ada istilah pembeda untuk saling menghargai dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari, ketiga anti narkoba. Itulah prinsip yang dilakukan PSI, selebihnya yang lain mengikuti sesuai ketentuan undang-undang.”

Menurut pernyataan informan diatas peneliti memahami bahwa PSI DPW Sumsel memiliki syarat khusus yang menjadi prinsip dalam pemilihan calon anggota legislatif yaitu bagi siapapun yang memiliki prinsip anti korupsi yang siap untuk diterapkan bukan hanya sekedar ucapan, anti intoleransi karena di Indonesia kita harus saling tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari dan anti narkoba.

2. Aspek Struktural

Dalam membentuk partai politik, hal yang menjadi faktor penting untuk diperhatikan adalah rekrutmen politik. Partai politik sangat berperan dalam melahirkan para kader yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan. Dalam hal ini, partai politik tidak melaksanakan rekrutmen saja, melainkan juga harus melaksanakan pendidikan kaderisasi untuk menyiapkan kader yang mampu menjalankan sistem dan membentuk karakteristik kepemimpinan yang akan datang.

Kader partai harus mengikuti sebuah proses dimana perekrutan kader-kader atau sering disebut dengan kaderisasi politik. Dimana kaderisasi politik merupakan tahapan pendidikan yang berjenjang untuk menanamkan nilai-nilai kepemimpinan guna mempersiapkan kader sebagai pemimpin yang mampu berperan aktif untuk memajukan partai politik melalui pelatihan-pelatihan yang memiliki kurikulum untuk menjadikan kader yang dipersiapkan duduk di jabatan-jabatan politik di pemerintahan dan meregenerasi kepemimpinan partai politik.

Sistem rekrutmen yang digunakan pada partai merupakan hal yang sangat penting dalam proses mendapatkan kader yang

memiliki sumber daya manusia yang berpotensi di bidangnya. Kader partai politik menjadi sangat penting karena memiliki keistimewaan dalam setiap fungsi-fungsinya. Kader partai memiliki keistimewaan tersendiri bagi partai politik, karena kader partai dapat memberikan keuntungan bagi partai untuk dapat mempengaruhi masyarakat.

PSI DPW Sumsel melakukan rekrutmen anggota dengan cara terbuka, yaitu dengan melakukan rekrutmen dengan tidak memandang status, kedudukan dan kekayaan seseorang. PSI DPW Sumsel merekrut anggota dengan menggunakan sistem online atau melakukan pendaftaran melalui situs resmi yang dimiliki partai dengan mengisi formulir yang disediakan oleh pengurus, mengisi nama, mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan keterangan lain, jika sudah diisi pendaftar akan segera dihubungi oleh pengurus partai untuk verifikasi. PSI DPW Sumsel juga melakukan rekrutmen melalui sosial media seperti instagram dengan cara membuat flayer tentang rekrutmen anggota yang berisikan informasi tatacara pendaftaran yaitu dengan langsung melakukan kirim pesan melalui akun sosial media partai dan juga bisa menghubungi lewat kontak whatsApp yang tertulis di flayer tersebut.

Selain melakukan pendaftaran secara online, PSI DPW Sumsel juga melakukan rekrutmen dengan cara langsung mendatangi kantor DPW PSI Sumsel untuk melakukan pendaftaran dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pengurus dan menyerahkan fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) untuk dibuatkan kartu tanda anggota (KTA).

Anak muda menjadi fokus rekrutmen yang dilakukan PSI untuk menjadi anggota maupun pengurus. Hal inilah yang menjadi pembeda antara PSI dengan partai yang lainnya. PSI menyadari bahwa anak-anak muda sekarang ini mulai sudah peduli terhadap politik, karena anak-anak muda berfikirnya visioner yang banyak memiliki inovasi-inovasi untuk kemajuan partai kedepannya, sehingga PSI mengharapkan peran anak muda didalam partai.

PSI adalah partai baru yang dikelola aktivis muda berusia dibawah 45 tahun. Dalam praktiknya, kader-kader PSI yang sudah bergabung rata-rata berusia 30 tahunan yang dimana para kadernya merupakan para aktivis politik baru yang sebelumnya tidak pernah menjadi pengurus harian partai manapun. Ini adalah cara PSI untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda bangsa untuk terlibat dalam menentukan masa depan bangsa. Ini juga merupakan cara PSI menolak gerontokrasi atau politik yang didominasi orang-

orang tua secara usia yang mengelola politik (ABC Partai Solidaritas Indonesia).

Seperti yang disampaikan dalam wawancara pada tanggal 15 Maret 2021 oleh kakak Rizky Amalia selaku wakil sekretaris Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Sumatera Selatan menyatakan bahwa:

“kebaikan itu bakalan kalah dengan kejahatan yang terorganisir, maka dari itu PSI mencari anak-anak muda yang bersih dari politik yang kotor , bagaimana caranya kita ajak anak muda untuk gabung ke PSI agar diberi tahu bahwa politik itu tidak selamanya buruk, kalau pun memang buruk sampai kapan mau kita biarkan, jadi kita anak-anak muda ini harus bergerak untuk mengubah politik dan pola pikir masyarakat terhadap politik yang jahat itu”

Menurut pernyataan informan diatas peneliti memahami bahwa PSI DPW Sumsel memilih anak muda menjadikan pengurus dan anggota partai agar bisa membenahi hal-hal yang buruk tentang politik, maka dari itu anak muda harus terjun langsung di dunia politik untuk mencapai nilai-nilai positif.

B. Basis Kekuatan Politik Anak Muda dalam Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Basis kekuatan politik sangat penting dalam sistem politik yang menjadi penunjang politik dalam partai. Kekuatan politik disetiap partai memiliki berbagai bentuk dan strategi yang digunakan. Kekuatan politik yang ada di Indonesia banyak dimiliki oleh aktor di dalam dunia perpolitikan. Dalam perkembangannya kekuatan politik banyak dilakukan oleh aktor yang telah berkontribusi dalam membangun dan memberikan corak tersendiri bagi sistem politik di Indonesia.

Peran anak muda di dalam tubuh partai menjadi inti basis kekuatan di internal partai. Sumber daya yang dimiliki anak muda membuat PSI tertarik untuk memberikan posisi yang lebih pada anak muda dalam menjalankan amanah partai ke depannya. Sumber daya anak muda yang dimiliki seperti idealisme, kemampuan dalam berteknologi serta pendidikan merupakan faktor penting dalam menjalankan roda partai politik. Hal ini menjadi bukti bahwa anggota dan kader merupakan hal yang penting dalam partai politik. Selain memberikan dukungan terhadap partai politik anggota dan kader juga menjadi pemasaran partai politik kepada masyarakat. Menciptakan kepercayaan masyarakat kepada partai politik yang saat ini banyak yang tidak percaya dengan peran partai politik di sistem pemerintahan.

Peran anak muda di dalam PSI sangat penting sebagai roda penggerak partai. PSI memposisikan anak muda sebagai penggerak partai sesuai dengan konsep kekuatan politik menurut Miriam Budiarmo, bahwa kekuatan politik memiliki pengertian yang bersifat individual. Kekuatan-kekuatan politik tidak lain adalah aktor-aktor politik atau orang-orang yang memainkan peran serta terlibat aktif dalam kehidupan politik. Aktor-aktor politik yang berperan tidak hanya sebatas itu, melainkan memiliki peran lain yaitu membuat kebijakan, melakukan komunikasi politik dan aktor tersebut berperan sebagai kendaraan politik (Budiarmo, Dasar-Dasar Ilmu Politik).

Aktor politik tidak lepas dengan yang namanya partai politik, karena partailah yang melahirkan aktor-aktor atau calon-calon politik nantinya. Aktor menjadi bagian dari salah satu kekuatan politik di Indonesia. Aktor politik dapat dibidang penting dalam hal politik yang telah dan sedang berlangsung. Aktor memiliki posisi penting guna memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat maupun pemerintah dalam hal pembuatan kebijakan. Aktor politik mencakup individu pemegang kekuasaan dalam suatu pembangunan politik yang ada. Pengangkatan seorang individu menjadi aktor politik memiliki dua cara. *Pertama*, transformasi dari peranan non-politis menjadi peranan politis yang bersifat khusus. *Kedua*, pengangkatan untuk menjalankan

tugas-tugas politik yang selama ini belum dikerjakan. Proses pengangkatan tersebut melibatkan berbagai persyaratan, baik persyaratan status maupun penyerahan posisi kepada individu (Nimmo, 2004).

Peranan partai politik dalam melahirkan aktor politik berguna untuk menghimpun kekuatan politik yang ada di dalam suatu partai, karena citra baik partai dapat dinilai dari peran aktor tersebut di masyarakat sehingga berguna untuk memobilisasi masyarakat nantinya. Aktor politik yang digunakan PSI untuk menjadi basis kekuatan partai adalah anak muda. Kehadiran anak muda dalam dunia politik selalu mewarnai perjalanan politik di Indonesia. PSI menyediakan tempat untuk anak muda untuk merubah pola pikir anak muda terhadap politik saat ini. PSI mengajak anak muda yang masih peduli dengan politik untuk ikut andil dalam hal ini. seperti yang disampaikan oleh Tsamara Amany:

“anak muda berpolitik untuk mengubah Indonesia, untuk mengambil kebijakan yang baik buat masyarakat. Kita harus masuk partai politik dan berkumpul di dalam satu fraksi bersama anak muda lainnya. DPR masih banyak yang tidak mendengarkan aspirasi masyarakat hanya mementingkan kepentingan pribadi dan partainya saja.”

Di dalam kepengurusan PSI anggotanya semua terdiri dari anak muda. PSI sebagai partai yang mengutamakan program-program

dengan menggunakan teknologi terutama dalam menggunakan media sosial, harus mempunyai anggota yang menguasai dalam bidang tersebut. Karena itu dalam kepengurusannya PSI lebih memilih anak muda sebagai penggerak. Peran anak muda dalam menggunakan media sosial untuk berpolitik sangat dibutuhkan, karena informasi-informasi disampaikan melalui media sosial sangatlah cepat karena sekarang semua kalangan telah menggunakan media sosial. Zaman teknologi seperti sekarang ini tidak dapat dipisahkan dengan politik.

Meningkatnya penggunaan media sosial bukanlah hal yang baru di Indonesia, keterikatan masyarakat dalam menggunakan media sosial sangat meningkat. Media sosial yang awalnya hanya digunakan untuk bersosialisasi dengan teman kini mulai menembus komunikasi antara individu dengan institusi. Dengan adanya fenomena ini PSI mulai melihat media sosial sebagai suatu alat untuk berinteraksi dengan masyarakat, termasuk untuk mempromosikan partai mereka. Bahkan menjelang pemilu legislatif partai politik mulai gencar membuat akun untuk melakukan kampanye terhadap partai dan caleg mereka.

PSI adalah partai yang menggunakan kreatifitas sebagai modal terbesarnya dalam berpolitik. PSI DPW Sumsel memanfaatkan kreatifitas anak muda dalam menggunakan media sosial, dapat dilihat dari model kampanyenya yang sangat kreatif dan cara melakukan

komunikasi yang gaul dan milenial. Dari awal terbentuknya PSI hingga sekarang dalam hal promosi mengenai partai, PSI DPW Sumsel juga menggunakan media sosial dalam hal kampanye. PSI DPW Sumsel lebih mengoptimalkan pemanfaatan media sosial instagram sebagai sarana untuk mempromosikan mereka kepada masyarakat luas terutama kepada pemilih milenial yang dimana para pemilih milenial ini pasti menggunakan instagram sebagai media sosial.

Seperti yang disampaikan dalam wawancara pada tanggal 13 juni 2021 oleh kakak Rizky Amalia selaku wakil sekretaris Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Sumatera Selatan menyatakan bahwa :

“Kami menggunakan media sosial sebagai wadah untuk komunikasi dan pengenalan kepada masyarakat, sekaligus memberikan informasi tentang apa saja yang kami lakukan secara gambaran besar. Mengingat semakin banyak yang menggunakan media sosial harus digunakan untuk hal yang bermanfaat.”

Menurut pernyataan informan diatas peneliti memahami bahwa PSI DPW Sumsel menggunakan media sosial sebagai alat untuk berinteraksi dan mempromosikan PSI kepada masyarakat dengan menggunakan instagram. Dalam hal ini PSI DPW Sumsel sangat serius menggunakan instagramnya pada akun @psisumsel dimana akun ini cenderung aktif sejak postingan pertama pada tanggal 18 Januari 2017 dan sekarang telah memiliki pengikut sebanyak 1.179 dan telah

memposting sebanyak 444 postingan per 1 Juni 2021. Selain dimanfaatkan untuk memposting informasi seputaran PSI DPW Sumsel, instagram juga digunakan PSI DPW Sumsel sebagai alat untuk berkampanye karena inilah cara termudah untuk mengajak masyarakat melihat keunggulan yang dimiliki PSI DPW Sumsel.

Selain memanfaatkan teknologi untuk kegiatan partai, PSI juga memanfaatkan peran anak muda di dalam partai. Anak muda yang terdapat di keanggotaan PSI sebelumnya bukan pengurus dari partai politik manapun atau bisa dikatakan partai PSI ini bukan merupakan pecahan atau anak partai manapun. Anak-anak muda inilah yang menjadi peran penting untuk menentukan arah partai ke depannya, karena anak-anak muda ini yang menjadi anggota di PSI memiliki ruang untuk bereksperimen terhadap politik. Mereka inilah yang nantinya akan menentukan cara berpolitik PSI ke depannya.

Seperti yang disampaikan dalam wawancara pada tanggal 15 Maret 2021 oleh kakak Rizky Amalia selaku wakil sekretaris Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Sumatera Selatan menyatakan bahwa :

“Anak muda ini sekarang sudah melek politik, sudah banyak yang ingin ikut partisipasi di politik, maka dari itu kita ingin memanfaatkan anak muda yang memiliki sangat banyak potensi. Jadi kita harus menggali anak muda ikut berpartisipasi di politik.”

Menurut pernyataan informan diatas peneliti memahami bahwa PSI DPW Sumsel menjadikan anak muda sebagai kekuatan politik partai karena saat ini anak muda sudah banyak yang ingin terjun langsung di politik dan juga memiliki potensi yang besar untuk kedepannya.

Di samping itu, PSI juga menggunakan istilah-istilah anak muda dalam setiap kegiatannya seperti “kopdar” atau “Kopi Darat Nasional” yang merujuk pada istilah Musyawarah Nasional yang biasa digunakan pada partai politik lainnya. Di PSI DPW Sumsel sendiri ada kegiatan yang dinamakan Cafe Solidaritas yang dimana kegiatan ini adalah kegiatan yang mengedukasi tentang pendidikan politik bagi anak-anak muda dengan harapan anak-anak muda jangan hanya menjadi objek pemilihan, tetapi harus menjadi subjek dalam pilkada maupun pemilu. Selain itu, dalam bertegur sapa PSI juga melakukan komunikasi yang sangat menarik dan milenial dengan menggunakan panggilan “bro” untuk teman laki-laki dan “sist” untuk teman perempuan.

Peran anak muda di PSI memiliki strategi untuk dapat mengambil hati para pemilih milenial dengan cara memunculkan seorang tokoh. Ketokohan seseoranglah yang dinilai penting oleh PSI karena untuk sekarang ini para pemilih lebih memilih seorang tokohnya

dibanding memilih partai politiknya. Cara anak muda di PSI untuk dapat mengambil hati para pemilih milenial dengan cara memahami aspirasi dan mengakomodir kreatifitas anak muda dengan menghadirkan cara berpolitik yang beda yang menghadirkan kreasi-kreasi anak muda di berbagai bidang dan bakat yang mereka miliki masing-masing guna menciptakan partisipasi masyarakat yang baik. Anak muda yang memiliki ruang kebebasan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dapat mendorong perubahan dan memberikan edukasi politik secara luas, sehingga wajah politik di Indonesia dapat berubah dan tidak lepas dari peran anak muda yang memiliki banyak harapan ke depannya.

Seperti yang disampaikan dalam wawancara pada tanggal 15 Maret 2021 oleh kakak Meidita selaku Wakil Bendahara Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Sumatera Selatan menyatakan bahwa :

“Karena anak muda itu kan berpikir visioner, jadi mereka itu tau apa yang akan mereka lakukan ke depannya.”

Menurut pernyataan informan diatas peneliti memahami bahwa PSIDPW Sumsel menjadikan anak muda sebagai peranan yang penting untuk kemajuan partai dan perpolitikan kedepannya.

Cara-cara anak muda di PSI dalam menghadirkan perubahan dan edukasi politik yang berbeda kepada masyarakat harus memiliki ide-ide yang cerdas. Seperti yang disampaikan oleh Tsamara Amany:

“Jika kalian memang ingin cerdas berpolitik dan konsen di dunia politik pertama yang harus kalian lakukan yaitu perbanyaklah baca berita, karena kalian akan tau permasalahan yang ada di Indonesia lewat berita. Kedua bisa memanfaatkan teknologi, bisa lewat vlog dan dalam tulisan. Ketiga sering-sering mengikuti organisasi yang sejalan dengan kalian, bisa BEM, bisa partai politik jika mau langsung atau organisasi yang afiliasinya dengan politik.”

Anak muda yang tergabung di PSI harus membangun kekuatan di internal partai tersebut. Anak muda harus memunculkan kekuatan sebagai penguat organisasi dengan cara bekerjasama dengan berbagai organisasi yang didalamnya terdapat peran anak muda juga seperti organisasi kepemudaan yang memiliki afiliasi dengan politik. Karena dalam memberikan edukasi cara berpolitik kepada masyarakat harus diiringi dengan edukasi politik yang mapan yang dimiliki anak tersebut agar anak muda tau cara berpolitik yang cerdas sebelum memberikan edukasi kepada masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisa dan membahas data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan terkait manuver PSI dalam putaran Pemilu 2019 studi kasus PSI DPW Sumsel, dalam bab ini peneliti menarik kesimpulan antara lain:

1. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPW Sumsel melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan kepemudaan dimana hal ini dilakukan secara langsung dengan cara *door to door* dengan tujuan agar dikenal masyarakat lebih dalam.
2. PSI DPW Sumsel melakukan rekrutmen anggota dengan cara online yang dilakukan melalui situs resmi dan akun sosial media yang dimiliki partai dan juga bisa dilakukan secara langsung dengan mendatangi kantor DPW PSI Sumsel.
3. PSI DPW Sumsel memilih anak muda sebagai basis kekuatan politik partai karena anak muda memiliki potensi yang besar untuk kedepannya, memiliki jiwa-jiwa yang visioner dan juga peran anak

muda di PSI memiliki strategi untuk dapat mengambil hati para pemilih milenial dengan cara memunculkan seorang tokoh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka peneliti memberikan saran bahwa PSI DPW SUMSEL dalam hal ini merupakan partai baru yang pertama kali ikut dalam kontestasi Pemilu 2019 harus lebih teliti dalam memilih seseorang yang dijadikan tokoh, karena ketokohanlah yang dinilai penting oleh masyarakat dengan komitmen yang kuat dan membuktikan bahwa jargon yang digaungkan yaitu anti korupsi dan intoleransi benar-benar diteguhkan dalam diri demi mencapai tujuan yang sama-sama masyarakat inginkan.

Bagi peneliti selanjutnya, kedepannya diharapkan untuk dapat lebih memfokuskan lagi tema yang akan di ambil dalam suatu penelitian sehingga hasil yang didapatkan tidak jauh dari perkiraan peneliti. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian dengan tema yang sama agar terlebih dahulu melakukan observasi dan pendekatan atau peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan memfokuskan pada manuver yang dilakukan pada partai.

DAFTAR PUSTAKA

- (2020). *manuver nyentrik PSI*.
- ABC Partai Solidaritas Indonesia*.
- Abdullah. (2007).
- adela, f. p. (2009). proses rekrutmen politik calon legislatif lokal di Medan pada pemilu 2009.
- (2018). *Bakal Calon Mulai Mendekat ke PSI*. Palembang: Palembang Ekspres.
- Budiardjo, M. (2004). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, M. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, M. (t.thn.). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.
- Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (2018). Jakarta.
- Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (2018). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Geotimes.co.id/Opini. (2020). *Manuver Nyentrik PSI*.
- Huntington, S. P. (1983). *tertib politik di dalam masyarakat yang sedang berubah*. Jakarta: cv. Rajawali.
- Kesuma, S. (2015). Rekrutmen politik partai hati nurani rakyat (Hanura) pada pemilihan umum Irgislatif di kota pekan baru tahun 2014. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Riau*, 1.
- Lay, C. (2006). *Involusi Politik Esai-esai Transisi Indonesia*. *program pasca sarjana*, 17.
- Nimmo. (2004). *Komunikasi Politik: Komunikasi, Pesan dan Media*. Bandung: Rosdakarya.
- puspitasari, y. d. (2019). *demokratisasi rekrutmen partai politik*. *pemilu dan demokrasi*.

- Rani, D. (2018). *Strategi Sosialisasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kepada Kaum Muda Indonesia*. Lampung.
- Rosyidin, I. (2014). Manuver Politik Golkar. *pikiran rakyat*.
- salim. (t.thn.). teori dan pradigma penelitian sosial. 104.
- Saputra, R. (2018). Rekrutmen Partai Politik. *Skripsi Program Studi Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Sugiono, P. D. (2017). *metode penelitian*. bandung: alfabeta.
- Surbakti, R. (2003). Tingkat pelembagaan Partai Politik.
- surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Pt. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Survei: PSI Tembus Dominasi Dinasti Politik di Sumsel I. (2019, maret jumat).
- Svasand, R. d. (t.thn.). *Institutionalization in new Democracion*.
- svasand, V. R. (2002). *Party institutionalization in new Democracies*.
- (2011). *Undang-undang Partai Politik & Perubahannya*.
- warsito, y. p. (t.thn.). Pola Rekrutmen Calon Legislatif Partai Politik.
- www.sumselprov.go.id

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN

Ketua Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial UIN Raden Fatah Palembang dengan ini menerangkan :

Nama : Subhan Robihan
Nomor Induk Mahasiswa : 1617020122
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : *Analisis Manuver PSI Dalam Putaran Pemilu 2019*
(Studi Kasus Partai PSI DPW Sumsel)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 setelah melalui sidang maka dinyatakan LULUS / ~~TIDAK LULUS~~ dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ____

Palembang, 3 Agustus 2021
Ketua Sidang

Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.HI
NIP. 197409242007012016



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini Selasa tanggal 3 bulan Agustus tahun 2021 telah dilaksanakan sidang ujian skripsi atas nama mahasiswa :

Nama : Subhan Robihan
Nomor Induk Mahasiswa : 1617020122
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : *Analisis Manuver PSI Dalam Putaran Pemilu 2019 (Studi Kasus Partai PSI DPW Sumsel)*

MEMUTUSKAN

1. Setelah mengumpulkan Nilai Teori dan hasil Munaqasyah pada sidang yang telah diselenggarakan maka saudara teruji dinyatakan **LULUS / TIDAK LULUS**, dengan Indeks Prestasi Kumulatif ---. Oleh karena itu saudara berhak memakai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos).
2. Perbaiki dengan tim penguji selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum penutupan pendaftaran wisuda terhitung sejak ditetapkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan poin di atas, maka dinyatakan belum bisa diikutsertakan mengikuti wisuda yang diselenggarakan pada periode berjalan.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

Tim Penguji:

No.	Tim Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Izomiddin, MA.	Pembimbing I	
2	Yulion Zalpa, MA.	Pembimbing II	
3	Dr. Kun Budianto, M.Si.	Penguji I	
4	Siti Anisya, M.Si.	Penguji II	



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 3 Agustus 2021

Ketua

Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.HI.
NIP. 197409242007012016

Sekretaris

Ryllian Chandra Eka Viana, MA.
NIP. 198604052019031011



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B.86 /Un.09/VIII/PP.01/01/2021
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

- MENIMBANG**
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
 2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
 3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Politik a.n. Subhan Robihan, tanggal, 19 November 2020
- MENINGGAT :**
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
 2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000;
 3. Instruksi Direktur Bimbaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
 4. Instruksi Menteri Agama RI No.8/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
 5. Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 6. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. 585 tahun 2016;
- MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN:
Pertama

: Menunjuk Saudara:

N A M A	NIP/NIDN	Sebagai
Prof. Dr. Izomiddin, MA.	19620620 198803 1 001	Pembimbing I
Yulion Zalpa, MA.	19880707 201903 1 011	Pembimbing II

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Saudara:

N a m a : Subhan Robihan

N I M : 1617020122

Prodi : Ilmu Politik

Judul Skripsi :

"Analisis Manuver PSI dalam Putaran Pemilu 2019 (Studi Kasus Partai PSI DPW Sumse)."

Masa bimbingan : Satu Tahun TMT. 15 Januari 2021 s/d 15 Januari 2022

- Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 15 Januari 2021



Tembusan:

1. Rektor ;
2. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan ;
3. Pembimbing Skripsi (1 dan 2) ;
4. Ketua Prodi Ilmu Politik ;
5. Arsip ;



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)**

Nomor : B527/Un.09/VIII/TL.01/02/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon izin Penelitian

Kepada Yth
Ketua DPW PSI Sumatera Selatan
Di
Palembang

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi/makalah mahasiswa kami :

Nama : Subhan Robihan
Alamat : Jln. M.P. Mangkunegara Korp. Pawon Permata Palembang
NIM : 1617020122
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah Palembang
Judul Skripsi : Analisis Manuver PSI dalam Putaran Pemilu 2019 (Studi Kasus Partai PSI DPW SUMSEL)

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian pada dua Instansi terkait .

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tembusan
1. Yth. Kaprodi Ilmu Politik
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip

Palembang, 25 Februari 2021


Dr. Izomiddin, MA
NIP. 196206201988031001



Dewan Pimpinan Wilayah SUMATERA SELATAN

Nomor : 006/B/DPW.VI/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Izin penelitian penulisan Karya Ilmiah

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Ilmu Politik (FISIP)
UIN Raden Fatah Palembang
Di -

Tempat

Sesuai dengan surat permohonan yang kami terima dengan Nomor: B327/Un.09/VIII/TL.01/02/2021, perihal izin penelitian penulisan karya ilmiah berupa skripsi/makalah tanggal 25 Februari 2021 Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah Palembang atas nama:

Nama : Subhan Robihan
Alamat : Jln. M.P Mangkunegara Komp. Pawon Permata Palembang
NIM : 1617020122
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah Palembang
Judul Skripsi : *Analisis Manuver PSI dalam Putaran Pemilu 2019 (Studi Kasus Partai PSI DPW SUMSEL)*

Telah kami setuju untuk melakukan penelitian di DPW PSI Provinsi Sumatera Selatan sebagai syarat penyusunan skripsi/makalah.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Palembang, 09 Maret 2021

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Sumatera Selatan

Ketua

Hermanto, S.H., M.Si



Hairil Anwar Moedj, S.E.

Tembusan

1. Yth. Kaprodi Ilmu Politik
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip

Dewan Pimpinan Wilayah Sumatera Selatan

Jl. Gb. H. Rantai No.21 Komplek TOP BWA A 12 RT 062 RW 017 Kelurahan 15 Ulu
Kecamatan Jakabaring Palembang
Telp. 0814-7694-7848
e-Mail dpwsumsel@psi.id



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Prof. KH. Zamal Abidin Fikry Km. 3,5 Tlp. 0711 354668 Palembang

Kartu Bimbingan Skripsi

Nama : Subhan Robihan
Nim : 1617020122
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul : Analisis Manuver PSI Dalam Putaran Pemilu 2019
(Studi Kasus Partai PSI DPW SUMSEL)
Advisor I : Prof. Dr. H. Izomiddin, M.A

No.	Days/ Date	Consulted Aspect	Comment	Signature
1.	21/06 2021		Revisi: perbaiki satu bagian yang belum lengkap sesuai hasil diskusi	[Signature]
2.	23/6 2021		Perbaiki rumusan artikel di bagian 1.	[Signature]
3.	25/6 2021		Analisis dan deskripsi di bagian 3	[Signature]
4.	28/6 2021		Revisi Bab 4 Tambahkan data PSI Sumsel	[Signature]
5.	29/6 2021		ACC lanjut ujian komparasi	[Signature]



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK

Jalan Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Km. 3,5 Tlp. 0711 354668 Palembang

Kartu Bimbingan Skripsi

Nama : Subhan Robihan
Nim : 1617020122
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul : Analisis Manuver PSI dalam Putaran Pemilu 2019
(Studi Kasus Partai PSI DPW Sumsel)
Advisor II : Yulion Zalpa, M.A

No.	Days/ Date	Consulted Aspect	Comment	Signature
1.	7-12-2020		- Latar belakang masalah belum ada perbaikan dan masih belum fokus. Susun sesuai arahan waktu sempro kemarin.	
2.	12-12-2020		- ACC	
3.	2-06-2021		- Rumusan masalah harus ditulis DPW Sumsel jangan hanya manuver PSI saja. - Rumusan masalah kedua jangan pakai mengapa, tapi pertanyakan juga bagaimana PSI merekrut anak muda di pemilu.	
4.	4-06-2021		- Di Bab 2 jelaskan juga dinamika DPW PSI Sumsel dalam peta politik sebelum pemilu 2019 itu.	
5.	6-06-2021		- ACC lanjutkan.	
6.	8-06-2021		- Bab 3 tambahkan data dan narasi terkait DPW Sumsel. - Dipembahasan juga tambahkan mengenai anak muda, misal bagaimana PSI menggunakan media sosial atau tagline millennial. - Tambahkan bagaimana pembentukan PSI di Sumsel, siapa saja, di tiap kabupaten ada berapa cabang, pengurusnya siapa saja. Suara perolehan tiap kabupaten berapa.	
7.	16-06-2021		- Acc, silahkan ke pembimbing 1	

DOKUMENTASI



Wawancara bersama bapak Hermanto selaku Ketua Umum DPW PSI Sumsel



Wawancara bersama bapak Sulaiman selaku Bendahara DPW PSI Sumsel



Wawancara bersama Kakak Meidita selaku wakil bendahara DPW PSI Sumsel



Wawancara bersama Kakak Rizky Amalia selaku Sekretaris DPW PSI Sumsel